

# HARMONI

# SOSIAL

Jurnal Sosiologi

**K E T U A P E N Y U N T I N G**

Harmona Daulay

**W A K I L K E T U A P E N Y U N T I N G**

Badaruddin

**P E N Y U N T I N G P E L A K S A N A**

Rizabuana

Henry Sitorus

Muba Simanihuruk

Lina Sudarwati

Linda Elida

Sismudjito

Rosmiani

T.I. Saladin

Ria Manurung

**P E N E L A A H ( M I T R A B E S T A R I )**

Prof. Dr. Mariam Darus, SH (USU Medan)

Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA (USU Medan)

Prof. Dr. Ridwan Lubis, MA (IAIN Medan)

Prof. Dr. Damsar, MA (Universitas Andalas)

Dr. Iwan Gardono, MA (Universitas Indonesia)

Dr. Ibnu Hajar, MSi (Universitas Negeri Medan)

**S T A F R E D A K S I**

Fenni Khairifa

Darma Kelana Putra

**ALAMAT PENYUNTING DAN TATA USAHA**

Jl. Prof. Dr. A. Sofyan No. 1

(Kampus Universitas Sumatera Utara),

P. Bulan Medan 20155

Telp./Fax: (061) 8211965, 8217167

E-mail: [harmoni\\_sosial@yahoo.com](mailto:harmoni_sosial@yahoo.com)

Vol. I No. 3 Tahun 2007  
ISSN 1907-4115

---

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.

Naskah diketik dengan spasi rangkap pada kertas A4, panjang 10-20 halaman sebanyak tiga eksemplar dan juga diserahkan dalam bentuk *soft copy*, diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penerbitan.

Naskah yang masuk dievaluasi oleh Penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

---

## **PENGANTAR REDAKSI**

Jurnal Harmoni Sosial kembali hadir kembali di tengah-tengah para akademisi dan pembaca sekalian untuk edisi yang ketiga. Kali ini kami menyajikan berbagai topik yang beragam. Keragaman topik tulisan semoga bisa memberikan keragaman wacana berpikir dan peningkatan analisis bagi akademisi dan pembaca sekalian. Harapan selanjutnya bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam penataan hubungan sosial di dalam masyarakat yang disana-sini masih banyak memerlukan kajian dan pengembangan pola-pola yang lebih komprehensif untuk keharmonisan sosial bersama.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fisip USU beserta jajarannya, Ketua Departemen Sosiologi dan rekan sejawat di Departemen Sosiologi atas dukungan dan kerjasamanya. Tak lupa juga kepada para penulis yang telah membeikan kontribusi tulisan ilmiahnya. Kepada Mitra Bestari yang tetap mendukung.

Harapan kami selanjutnya edisi ketiga ini semakin memberikan eksistensi Harmoni Sosial sebagai media komunikasi ilmiah ilmu sosial dan sosiologi khususnya. Edisi kali ini juga diharapkan dapat memuaskan visi ilmiah akademisi dan pembaca semuanya. Kami mengundang dan mengharapkan akademisi dan pembaca sekalian untuk memberikan masukan, kritik, dan gagasan-gagasan baru untuk hadir dalam Jurnal Harmoni berikutnya. Jurnal Harmoni Sosial mengharapkan tetap menjadi pioner dalam peduli dan kritis terhadap masalah-masalah sosial di dalam masyarakat Indonesia umumnya dan dalam wacana serta iklim akademik khususnya. Selamat membaca...

Wassalam,

Redaksi

# pengantar

*Harmoni Sosial* merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Penerbitan tiap edisinya merupakan aplikasi ide dan pemikiran yang cukup lama untuk mempublikasikan isu-isu sosiologis dan pergulatan teoretis aktual dewasa ini.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan moril dan materiil kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Ketua Departemen Sosiologi, dan rekan-rekan sejawat Staf Pengajar di Departemen Sosiologi.

Harapannya, semoga jurnal ini mampu memberikan wacana, informasi, dan pergulatan teoretis akademis yang akan meningkatkan pengetahuan, daya kritis dalam kancah ilmu sosial umumnya dan Sosiologi khususnya.

Wassalam,

Ketua Penyunting

Agung Utama Lubis, Amiruddin Ketaren, dan Rakhmadsyah Putra Rangkuti	PENGETAHUAN REMAJA PRIA DALAM MENCEGAH KEHAMILAN DI DESA PANTAI, SUMATERA UTARA .....	114 – 121
Ahmad Hidayah Dlt	FAKTOR EKONOMI DAN KEINGINAN BERPRESTASI MASYARAKAT PADANG LAWAS BERMIGRASI KE KOTA MEDAN.....	122 – 126
Effiati Juliana Hasibuan dan Hottob Harahap	PLURALISME HUKUM PADA KASUS PERKAWINAN SEMARGA PADA ETNIS PADANG LAWAS DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN.....	127 – 132
Fenni Khairifa	PENYAMPAIAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT KEPADA KHALAYAK.....	133 – 137
Nurlela Ketaren	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN KOPERASI CREDIT UNION DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus: Koperasi Credit Union Partisipasi Sukamakmur Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang).....	138 – 146
Rizabuana Ismail	GENERASI KEDUA PETANI P.I.R. : PERLU DIFIKIRKAN ATAU BIARKAN MEREKA MISKIN KEMBALI?.....	147 – 151
Robert Siregar	KAJIAN SOSIO KULTURAL, POLITIS, DAN EKONOMI MASYARAKAT PEMILIH DALAM PILKADA.....	152 – 156

## PENGETAHUAN REMAJA PRIA DALAM MENCEGAH KEHAMILAN DI DESA PANTAI, SUMATERA UTARA

Agung Utama Lubis  
Amiruddin Ketaren  
Rakhmadsyah Putra Rangkuti

**Abstract:** Reproductive health has become the concern of many people since International Conference on Population and Development (ICPD) in Cairo in September 1994. Reproductive health issue is not only part of medical area, but also related to social and cultural aspect of concern. There have been many research related to adolescence reproductive health but those were too quantitative. This research describes adolescence knowledge to avoid pregnancy in qualitative perspective. There are four categories of adolescence knowledge in avoiding pregnancies explained in this paper.

**Keywords:** adolescence, reproductive health

### PENDAHULUAN

Kesehatan reproduksi telah menjadi perhatian berbagai pihak. Perhatian terhadap bidang ini antara lain muncul dari dunia kesehatan dan dunia pendidikan. Perhatian terhadap bidang ini semakin besar terutama sejak diadakannya Konferensi Kependudukan di Kairo pada bulan September 1994.

Permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi tidak pernah seluruhnya menjadi kajian bidang ilmu kesehatan, melainkan juga berkaitan dengan aspek sosial budaya masyarakat (Sciortino dalam Browner dan Sargent: 1990).

Kesehatan reproduksi mencakup berbagai kondisi material dan aktivitas sosial. Kesehatan reproduksi sebagai proses sosial budaya mencakup berbagai kepercayaan, praktik-praktik di seputar seleksi waktu, pasangan, larangan, dan anjuran di sekitar praktek perinatal, pasca melahirkan, dan berkaitan dengan kesuburan dan menopause. Lebih dari itu, kesehatan reproduksi juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem politik, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem budaya, dan jender. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas masalah kesehatan reproduksi dari aspek sosial budaya.

Masalah-masalah kesehatan reproduksi dan seksual remaja, termasuk kehamilan yang tidak dikehendaki, abortus yang tidak aman, serta PMS dan HIV/AIDS, ditangani melalui upaya memajukan perilaku reproduksi dan seksual yang sehat dan bertanggung jawab,

termasuk pantangan secara sukarela, serta pemberian konseling dan pelayanan yang sesuai dengan kelompok umur tersebut (UNFPA, 1994: 14).

Informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang ada selama ini dirasakan kurang menyentuh kaum remaja. Misalnya, berbagai penyuluhan kesehatan reproduksi yang ada biasanya hanya diikuti oleh ibu-ibu atau wanita yang telah menikah. Padahal, menurut Ikatan Dokter Indonesia remaja juga termasuk dalam golongan yang menjadi sasaran program keluarga berencana sehingga perlu juga memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi. Minimnya informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja ini diperparah oleh anggapan sebagian orang tua yang masih menganggap tabu untuk membicarakan masalah reproduksi secara terbuka (Beni, 1995).

Di sisi lain, terdapat kecenderungan meningkatnya perilaku reproduktif remaja masa kini. Khisbiyah (1994) mengutarakan beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan perilaku reproduktif remaja, antara lain:

1. usia pubertas remaja yang lebih dini.
2. kecenderungan penundaan usia nikah.
3. peningkatan dorongan seks pada usia remaja.
4. kurang memadainya pengetahuan remaja tentang proses dan kesehatan reproduksi.
5. meningkatnya jumlah remaja yang aktif secara seksual.
6. miskinnya pelayanan dan bimbingan tentang kesehatan reproduksi remaja, serta.
7. pengaruh budaya pop yang menyebabkan nilai *easy sex* melalui berbagai media.

Berbagai penelitian menunjukkan peningkatan perilaku reproduktif di kalangan remaja baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia menyatakan hubungan seksual pranikah hampir terdapat di mana-mana dengan intensitas yang berbeda-beda. Penelitian lain yang dilakukan oleh Unika Atmajaya dan Polri mengungkap hubungan pranikah dilakukan oleh 9% responden setelah menonton *blue film*. Sedangkan Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran menemukan bahwa hubungan pranikah di Bandung, Cirebon, Bogor, dan Sukabumi masing-masing 21,8%, 31,6%, 30,9%, dan 26,5% dari keseluruhan responden (Siregar, 1995). Sejalan dengan hal itu, Faturochman dan Sutjipto menemukan bahwa kasus hubungan pranikah di Desa dan di kota yang terjadi masing-masing 23,6% dan 33,5%.

Penelitian-penelitian di atas bersifat sangat kuantitatif dan lebih menonjolkan aspek perilaku tanpa memperhatikan aspek pengetahuan yang dimiliki oleh para remaja tersebut mengenai kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas berbagai pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi, khususnya dalam mencegah kehamilan. Remaja dalam penelitian ini adalah yang individu yang berusia antara 15 hingga 24 tahun dan belum menikah. Idealnya, diungkapkan berbagai pengetahuan yang dimiliki oleh pria dan wanita, namun dalam tulisan ini hanya dibahas pengetahuan yang dimiliki remaja pria dalam mencegah kehamilan.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Remaja Pria Desa Pantai

Desa Pantai merupakan suatu Desa yang terletak di provinsi Sumatera Utara. Desa ini berjarak kurang lebih 149 kilometer dari kota Medan dan dapat ditempuh selama empat jam dengan menumpang bus umum. Desa Pantai terletak di tepi Selat Sumatera dengan ketinggian 1,5 meter di atas permukaan laut. Penduduk Desa ini mayoritas bersuku bangsa Melayu. Sebanyak 98,14% dari 8.397 jiwa penduduk menganut agama Islam. Karena letaknya yang dekat dengan laut, sebagian besar (63% atau 1.103 kk) penduduknya berprofesi sebagai nelayan.

Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak sebelum memasuki masa dewasa. Di Desa pantai, seorang anak yang baru memasuki usia remaja disebut dengan istilah

*pecahan botol* atau anak *tigo seribu*. Istilah ini mirip dengan istilah *anak baru gede* atau ABG pada remaja Jakarta.

Seorang anak yang memasuki usia remaja akan mengalami berbagai perubahan dalam dirinya, baik secara biologis dan tingkah laku maupun dalam kebiasaan sehari-hari. Pengetahuan remaja berkaitan dengan perubahan biologis yang dialami bersumber dari ajaran agama yang mereka anut, yaitu Islam. Masa remaja atau masa akil balik biasanya ditandai dengan mimpi basah atau *mimpi seks* menurut istilah remaja setempat. Perubahan fisik lainnya adalah volume suara yang semakin besar dan pecah. Munculnya jakun di bagian leher juga dianggap sebagai tanda seorang memasuki masa akil balik. Selain itu, tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tubuh tertentu, seperti pada kumis, bagian ketiak, dan di sekitar kemaluan juga merupakan pertanda seseorang telah memasuki masa akil balik.

Perubahan perilaku dan kebiasaan seorang anak yang memasuki masa remaja juga terdapat pada remaja Desa Pantai. Seorang remaja pria sudah mulai gemar berdandan dengan memakai minyak rambut, bedak, dan parfum yang dapat mereka beli secara eceran di warung-warung rokok di pinggir jalan. Kebiasaan merokok juga sudah mulai dilakukan pada masa remaja ini, meskipun sebagian orang sudah mulai merokok pada usia kanak-kanak. Pada masa ini juga seorang remaja mulai tertarik kepada lawan jenisnya.

Terdapat kebiasaan keluar malam pada malam Kamis dan malam Minggu di kalangan remaja Desa Pantai. Kedua malam tersebut merupakan malam istimewa bagi remaja setempat untuk sekedar berkumpul dengan teman sebaya ataupun untuk bertemu dengan pacar bagi yang sudah memilikinya. Pada kedua malam ini biasanya mereka berjalan-jalan di sepanjang Jalan Merdeka yang menjadi pusat kota kecamatan. Di tempat ini mereka dapat bertemu dengan teman untuk sekedar *berkombo-kombo* atau berbincang-bincang dengan teman sebaya.

Remaja di Desa Pantai sedikitnya dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan. Golongan pertama adalah remaja pelajar, kedua adalah remaja putus sekolah, dan ketiga adalah remaja sebagai nelayan. Remaja pelajar di Desa ini jumlahnya relatif tidak terlalu banyak. Berdasarkan data kependudukan, sebagian besar penduduk adalah tamatan SD, yaitu 41,3%,

sedangkan yang tamat SMP dan SMA masing-masing hanya 16,48% dan 4,35%. Angka putus sekolah di daerah ini juga relatif tinggi. Berdasarkan informasi dari kepala SMU Negeri I, jumlah siswa yang putus sekolah pada tahun 1995/1996 adalah 19%. Penyebab tingginya angka tersebut adalah karena siswa menikah atau bekerja sebagai nelayan.

Golongan kedua remaja Desa Pantai adalah golongan remaja putus sekolah. Penyebab utama remaja putus sekolah ini terutama adalah untuk wanita biasanya karena menikah, sedangkan untuk laki-laki adalah karena bekerja, baik sebagai *anak itik*<sup>1</sup> atau nelayan. Mereka yang putus sekolah kemudian bekerja ini biasanya terdorong ingin dapat memiliki duit sendiri seperti teman-teman sebaya mereka lainnya. Selain itu menurut beberapa orang guru, tampaknya pendidikan belum menjadi prioritas utama bagi warga Desa setempat. Hal ini tentu saja menambah deretan remaja yang putus sekolah.

Golongan ketiga adalah remaja yang bekerja sebagai nelayan. Nelayan di daerah ini biasanya mempergunakan perahu dengan motor tempel dengan mempergunakan jaring sebagai alat untuk menangkap ikan. Kegiatan penangkapan ikan dimulai pada saat air mulai pasang. Air pasang ini terjadi antara pukul 24.00 dan pukul 03.00 dinihari. Para nelayan ini akan kembali antara pukul 13.00 dan pukul 15.00 sore harinya.

Remaja di Desa ini memanfaatkan waktu sore hari mereka dengan berkumpul bersama teman sebaya mereka. Kegiatan ini mereka lakukan setiap hari hingga menjelang magrib. Kegiatan yang mereka lakukan mulai dari sekadar *berkombo-kombo* (bercakap-cakap), bernyanyi sambil diiringi gitar, atau hanya sekadar duduk-duduk saja. Ketika *berkombo-kombo*, yang dibicarakan biasanya seputar kegiatan mereka menangkap ikan atau membicarakan hal lain, termasuk membicarakan masalah perempuan.

---

<sup>1</sup> Anak itik merupakan sebutan bagi anak-anak Desa yang bekerja membersihkan sampan milik nelayan sambil mengumpulkan ikan-ikan sisa tangkapan nelayan yang tercecer disekitar tempat pelelangan ikan atau tersisa di dalam perahu nelayan. Pekerjaan sebagai anak itik ini tidak berlangsung lama karena kemudian anak-anak itik ini akan ikut melaut sebagai nelayan.

Berteman dengan lawan jenis, atau menurut istilah setempat *bercewek*, dilakukan oleh seorang anak yang memasuki usia remaja. Usia mulai berpacaran di kalangan remaja pria bervariasi antara 14 hingga 17 tahun. Perilaku dalam berpacaran pun bervariasi mulai dari sekadar berjalan berduaan hingga menjurus ke arah yang sifatnya menjurus ke perilaku seksual aktif. Hal ini bergantung pada pengalaman dan keberanian si remaja.

Kegiatan *bercewek* biasanya dilakukan di luar rumah, penyebabnya adalah kondisi rumah yang tidak memungkinkan para remaja ini leluasa untuk berpacaran di tempat tinggal mereka. Rumah yang hanya terdiri atas satu kamar tidur, dapur, dan ruang tamu yang merangkap sebagai ruang keluarga menyebabkan rumah yang dihuni oleh setidaknya lima atau enam orang anggota keluarga itu tampak terlalu ramai bagi para remaja. Tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh para remaja antara lain adalah Jalan Merdeka, kantin<sup>2</sup>, Kampung Lalang, serta di sekitar pantai. Dampak dari berpacaran di luar rumah adalah semakin longgarnya kontrol orang tua terhadap anak mereka.

Terdapat gejala yang menjurus ke arah permisif di kalangan remaja pria Desa Pantai. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan informan, terdapat beberapa kasus yang menjelaskan terjadinya hubungan pranikah. Hal ini terjadi antara lain disebabkan karena film-film yang mereka lihat menunjukkan hal-hal yang berbau pornografi. Selain itu, pengaruh dari teman sebaya yang begitu kuat di kalangan remaja kerap kali ikut memancing keberanian remaja lainnya untuk lebih bersikap agresif terhadap teman wanitanya. Minimnya sarana penerangan di Desa tersebut lebih memudahkan para remaja itu melakukan berbagai hal untuk melampiaskan fantasi mereka.

## **PENGETAHUAN REMAJA PRIA DALAM MENCEGAH KEHAMILAN**

Hubungan seksual memiliki dua fungsi utama, yaitu prokreasi dan rekreasi. Fungsi prokreasi dari hubungan seksual tersebut adalah untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan fungsi

---

<sup>2</sup> Kantin adalah sebutan untuk tempat sejenis warung yang menjual makanan dan minuman. Tempat ini ditata sedemikian rupa agar menarik minat para remaja untuk berkunjung ke tempat itu.

rekreasi berarti hubungan seksual tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk kehamilan seorang wanita dan melahirkan seorang anak. Oleh karena itu, dewasa ini berkembang berbagai metode kontrasepsi mulai dari yang paling sederhana hingga alat-alat kontrasepsi modern.

Secara sederhana para remaja mengetahui kehamilan dapat terjadi bila terjadi pertemuan antara sperma dengan sel telur melalui hubungan badan. Pengetahuan ini mereka peroleh melalui pelajaran di sekolah maupun melalui informasi yang diperoleh dari teman sebaya.

Berdasarkan wawancara dengan informan, penulis berhasil menemukan berbagai cara yang diketahui oleh para remaja pria Desa Pantai dalam mencegah terjadinya kehamilan. Penulis mencatat sedikitnya ada 25 macam cara yang diketahui oleh remaja pria Desa Pantai dalam mencegah terjadinya kehamilan. Dari catatan tersebut, penulis mengelompokkannya menjadi empat kategori pengetahuan:

1. Kategori pengetahuan kontrasepsi modern.
2. Kategori pengetahuan memanipulasi organ tubuh.
3. Kategori pengetahuan praktek perilaku berhubungan.
4. Kategori pengetahuan jamu-jamuan.

Pengetahuan ini dimiliki oleh remaja dengan jumlah yang berbeda-beda antara satu remaja dengan remaja lainnya. Berdasarkan daftar pertanyaan yang disebarkan kepada remaja setempat diketahui satu orang remaja dengan pengetahuan terbanyak, yaitu yang memiliki pengetahuan 14 macam cara mencegah kehamilan. Sedangkan remaja dengan pengetahuan yang paling sedikit berjumlah tiga orang yang masing-masing mengetahui satu macam cara pencegahan kehamilan. Pengetahuan yang dimiliki remaja Desa Pantai itu sebagian besar diperoleh melalui teman-teman sebaya. Dalam hal ini terlihat besarnya peran teman sebaya dalam membentuk pengetahuan kaum remaja (Saifuddin dan Hidayana, 1999: 46-51).

Pengetahuan ini menyebar di kalangan remaja pada saat mereka berbincang-bincang dalam suasana yang santai. Remaja-remaja ini mengaku meskipun bagi yang belum pernah mempraktekkan pengetahuannya itu, namun mereka mempercayai informasi yang diperoleh dari teman-teman mereka. Hal ini tentu saja dapat menjadi masalah di kemudian hari apabila ternyata para remaja tadi memperoleh informasi

yang tidak benar mengenai cara-cara mencegah kehamilan.

Pengetahuan yang dimiliki oleh para remaja itu biasanya hanya secara garis besarnya saja. Mereka mengaku tidak mengetahui secara detail cara mencegah kehamilan tersebut. Hal ini terjadi karena informasi yang mereka peroleh hanya dari mulut ke mulut saja sehingga penyampaiannya pun tidak secara rinci. Meskipun demikian, mereka tetap mempercayai informasi tersebut.

Informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi kurang menyentuh kaum remaja. Tidak ada informasi maupun pelayanan yang diberikan oleh sarana pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja, meskipun di antara mereka ada yang merasa membutuhkan informasi dan pelayanan semacam itu. Meskipun demikian, ada di antara remaja tersebut yang secara kebetulan mengikuti penyuluhan keluarga berencana yang diadakan di kantor balai Desa. Sedikitnya ada dua orang remaja pria yang pernah mengikuti kegiatan tersebut. Pertama, karena mengantarkan orang tuanya ikut penyuluhan. Kedua karena diminta untuk membantu penyediaan konsumsi bagi peserta penyuluhan. Dengan demikian pada dasarnya tidak ada remaja yang secara khusus di undang untuk mengikuti penyuluhan maupun pelayanan keluarga berencana.

### **Kategori Pengetahuan Kontrasepsi Modern**

Kategori pengetahuan kontrasepsi modern didasarkan pada metode kontrasepsi keluarga berencana yang diketahui oleh para remaja. Alat-alat kontrasepsi yang diketahui oleh para remaja Desa Pantai meliputi penggunaan kondom, pil KB, suntikan, IUD, spiral, kontap, parfum KB, tisu KB, susuk KB, dan memotong peranakan.

Kondom; adalah alat yang terbuat dari karet tipis yang berbentuk seperti kantung. Kondom merupakan jenis alat kontrasepsi yang paling banyak diketahui oleh remaja Desa Pantai. Dari 30 orang remaja yang diwawancarai, 27 orang di antaranya mengetahui kondom sebagai salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencegah kehamilan. Dari 27 orang remaja yang mengetahui kondom sebagai alat kontrasepsi, hampir seluruhnya percaya efektivitas kondom dalam mencegah kehamilan. Sebanyak 24 orang informan mengetahui cara pemasangan kondom sedangkan tiga orang tidak mengetahui cara

pemasangan kondom tersebut. Berdasarkan hasil wawancara diketahui satu orang remaja mengaku pernah mempergunakan kondom sebagai alat untuk mencegah kehamilan.

Pil KB; adalah sejenis obat untuk mencegah kehamilan yang biasanya diminum oleh wanita. Pil KB tersebut diketahui oleh sebanyak 17 orang remaja pria Desa Bogak dari sejumlah 30 orang yang diwawancarai. Dari jumlah 17 orang tersebut, 16 orang diantaranya mempercayai efektivitas pil KB dalam mencegah kehamilan. Di antara mereka, sebanyak 7 orang mengaku mengetahui cara penggunaan pil KB untuk mencegah kehamilan, 10 orang lainnya tidak mengetahui cara pemakaian pil KB tersebut. Sedangkan salah seorang informan mengaku pernah mempergunakan pil KB untuk mencegah kehamilan untuk pacarnya.

Suntikan; Remaja Desa Pantai yang mengetahui suntikan sebagai alat pencegah kehamilan berjumlah 16 orang. Namun hanya lima orang yang mengetahui cara pemakaian alat suntik tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 11 orang tidak mengetahui.

IUD; adalah singkatan dari *intra uterine device* merupakan alat kontrasepsi yang dipergunakan di dalam rahim wanita. IUD hanya diketahui oleh dua orang informan dan hanya satu diantaranya yang mengetahui cara pemasangan alat ini.

Spiral; merupakan jenis alat kontrasepsi yang dipakai di dalam rahim wanita. Spiral sebagai alat kontrasepsi diketahui oleh 11 orang informan dan seluruhnya mempercayai efektivitas penggunaan alat tersebut. Dari sejumlah orang yang mengetahui spiral, hanya empat orang yang mengetahui cara pemasangan spiral ke dalam rahim wanita, sedangkan tujuh orang lainnya tidak mengetahui cara pemasangan spiral.

Kontrasepsi mantap; adalah suatu metode keluarga berencana yang dapat dilakukan baik kepada wanita maupun pria. Kontrasepsi mantap bagi wanita disebut dengan istilah tubektomi, sedangkan kontrasepsi mantap bagi pria disebut dengan istilah vasektomi. Metode kontap diketahui oleh tujuh orang informan dan seluruhnya mempercayai efektivitas metode tersebut.

Parfum KB; metode ini hanya diketahui oleh seorang informan. Parfum KB ini digunakan dengan cara menyemprotkannya ke kemaluan si wanita sebelum melakukan senggama. Dengan

menyemprotkan parfum KB, maka kemaluan si wanita akan terselubung. Dengan demikian, sperma laki-laki tidak dapat membuahi si wanita karena sperma tersebut telah kehilangan kekuatan.

Tisu KB; metode ini hanya diketahui oleh dua orang informan. Pemakaian tisu KB ini dengan cara mengusapkannya di kemaluan si wanita sebelum melakukan senggama. Cara kerja tisu KB hampir sama dengan parfum KB, yaitu melemahkan kerja sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki.

Histerektomi; histerektomi atau memotong rahim wanita dapat dilakukan dengan operasi. Seorang wanita yang rahimnya telah dipotong, tidak dapat melahirkan lagi untuk selamanya. Memotong rahim sebenarnya sangat ditakuti oleh wanita. Pemotongan rahim ini dilakukan apabila seorang wanita menderita sakit pada rahimnya. Metode ini diketahui oleh tiga orang informan.

### **Kategori Manipulasi Organ Tubuh**

Kategori memanipulasi organ tubuh didasarkan pada upaya melakukan perubahan fungsi organ tubuh. Kategori manipulasi organ tubuh ini antara lain; menaikkan peranakan, membalik peranakan, *mengusuk/memijat* perut si wanita setelah bersenggama, menggorek vagina setelah senggama, dan memukul pantat si wanita setelah melakukan senggama.

Menaikkan peranakan; metode ini dilakukan untuk mencegah kehamilan. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa apabila peranakan seorang wanita itu jauh, sperma laki-laki tidak dapat bertemu dengan sel telur dan tidak akan terjadi kehamilan. Menaikkan peranakan dilakukan oleh dukun beranak yang mengerti seluk-beluk rahim wanita. Metode ini diketahui oleh enam orang informan dan lima diantaranya mempercayai efektivitas metode tersebut dapat mencegah terjadinya kehamilan. Hanya satu orang informan yang tidak mempercayai metode *kusuk* tersebut.

Membalikkan peranakan; metode ini masih mendapat tanggapan pro dan kontra di kalangan masyarakat Desa Pantai, termasuk remaja. Sebagian besar remaja menganggap membalik peranakan merupakan tindakan yang dilarang oleh agama. Hal itu disebabkan karena seorang wanita yang peranakannya telah dibalik

tidak akan dapat melahirkan anak lagi untuk selamanya. Metode *kusuk* dengan membalik peranakan ini diketahui oleh lima orang informan remaja pria Desa Pantai.

Untuk mencegah terjadinya kehamilan, remaja Desa Pantai menganggap dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan kembali sperma yang telah dikeluarkan oleh laki-laki. Pengetahuan ini muncul karena adanya anggapan di kalangan para remaja tersebut bahwa rahim wanita berbentuk menyerupai mangkuk. Untuk mencegah kehamilan, maka sperma tadi harus dikeluarkan setelah mengadakan senggama (*pangka*). Sperma yang telah masuk ke kemaluan wanita dapat dikeluarkan dengan cara setelah melakukan senggama, si wanita disuruh jongkok, kemudian perutnya di *kusuk-kusuk*.

Mengorek vagina; setelah melakukan *pangka*, si wanita disuruh jongkok, kemudian kemaluannya di *gorek-gorek*. Mengorek kemaluan wanita tadi dilakukan dengan mempergunakan dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Metode ini diketahui oleh 12 orang informan dan 11 orang di antaranya mempercayai efektivitas metode tersebut. Hanya satu orang informan yang tidak percaya efektivitas metode tersebut. Satu orang informan mengaku pernah mempraktekkan metode ini.

Memukul pantat; adalah dengan menyuruh si wanita jongkok, kemudian pantatnya dipukul-pukulkan dengan tangan. Apabila hal itu dilakukan setelah senggama, dapat dikeluarkan kembali sperma yang telah masuk ke dalam kemaluan wanita. Mengeluarkan sperma dengan cara memukul-mukulkan pantat si wanita. Metode ini diketahui oleh 10 orang informan, mereka mempercayai efektivitas metode tersebut, akan tetapi belum pernah dipraktikkan.

### **Kategori Praktek Perilaku Senggama**

Kategori praktek perilaku senggama didasarkan pada waktu serta cara yang dilakukan pada saat melakukan senggama. Kategori ini terdiri dari; metode kalender, melakukan senggama pada waktu sebelum haid, *lago ecek*, dan senggama terputus.

Sistem Kalender; metode ini dilakukan dengan mempergunakan sistem kalender (siklus haid). Pada sistem kalender, senggama dilakukan pada masa si wanita sedang tidak berada pada masa subur dalam siklus haidnya agar tidak terjadi kehamilan. Sistem kalender hanya

disebutkan oleh satu orang informan sebagai salah satu cara untuk mencegah kehamilan.

Senggama sebelum haid; dalam metode ini senggama dilakukan beberapa hari sebelum si wanita tersebut mendapat haid. Hal yang mendasari pendapat ini adalah karena setelah melakukan senggama, maka sperma si laki-laki yang telah masuk ke dalam rahim si wanita dapat keluar lagi ketika haid. Metode ini nampaknya kurang populer di kalangan informan. Hanya satu orang informan yang mengetahui melakukan senggama sebelum haid dapat mencegah kehamilan.

Senggama ketika Haid; melakukan senggama pada waktu si wanita mendapat haid adalah waktu yang paling aman, karena pada masa ini si wanita sedang berada pada masa tidak subur. Namun, sesuai dengan ajaran agama Islam yang dianut oleh sebagian besar penduduk Desa Bogak, para remaja menyatakan bahwa melakukan senggama ketika si wanita sedang haid adalah haram. Melakukan senggama ketika si wanita sedang haid diketahui oleh tiga orang informan.

*Lago ecek*; menurut arti kata berasal dari kata *lago* yang berarti *laga* atau *tanding* dan kata *ecek-ecek* yang berarti *tidak sungguhan* atau *main-main*. *Lago ecek* yang dimaksudkan berarti sepasang laki-laki dan perempuan seolah-olah melakukan senggama, namun kemaluan si laki-laki tidak sampai masuk ke dalam kemaluan wanita. *Lago ecek* ini dapat dilakukan dengan cara si wanita dan pria sama-sama memakai celana dalam atau hanya salah satu saja yang memakai celana dalam. Metode *lago ecek* diketahui oleh 18 orang informan dan seluruhnya mengetahui cara melakukan *lago ecek* tersebut. Dari sejumlah informan yang mengetahui *lago ecek*, empat orang diantaranya pernah melakukan metode tersebut.

Senggama Terputus; metode senggama terputus atau *coitus interruptus* merupakan metode kontrasepsi tertua dan paling luas dipergunakan di seluruh dunia (Dolto, 1991). Metode ini dilakukan dengan cara si laki-laki menarik penis sebelum ejakulasi, dengan demikian menuntut kewaspadaan si laki-laki untuk mengendalikan dirinya. Metode ini tidak dapat diandalkan karena si laki-laki tadi mungkin telah mengeluarkan air maninya sebelum mencapai ejakulasi. Metode senggama terputus diketahui oleh 13 orang informan. Dari jumlah

tersebut, satu orang di antaranya pernah mempraktekkan metode tersebut.

### Kategori Jamu-jamuan

Kategori jamu-jamuan didasarkan pada upaya meminum atau memakan ramuan yang dipercaya dapat mencegah terjadinya kehamilan. Kategori jamu-jamuan terdiri atas jamu pencegah kehamilan, meminum rebusan akar *ali-ali*, memakan nanas, memakan ragi, dan meminum obat kuat yang dilakukan oleh si wanita.

*Ali-ali*; merupakan suatu jenis tumbuhan yang biasa disebut brotowali. Akar *ali-ali* ini diketahui oleh lima orang informan dapat mencegah terjadinya kehamilan. Cara mencegah kehamilan menggunakan akar *ali-ali* ini adalah dengan meminum air rebusan akar *ali-ali* tersebut setiap hari, pagi dan sore hari untuk mencegah kehamilan sebelum melakukan senggama. Apabila ingin mempunyai anak, si wanita harus berhenti meminum air rebusan tersebut.

Nanas muda; nanas muda diketahui dapat mencegah terjadinya kehamilan dengan meminumnya sebelum melakukan *pangka*. Nanas muda tersebut dikonsumsi bersama dengan tape ketan hitam pada siang hari. Memakan nanas muda ini hanya diketahui oleh dua orang informan dan satu orang diantaranya tidak mengetahui cara membuat ramuan tersebut.

Ramuan yang dapat meningkatkan gairah seks bagi pria dapat juga digunakan untuk mencegah kehamilan apabila diminum oleh wanita. Dua orang informan mengetahui bahwa metode ini dapat mencegah terjadinya kehamilan, namun mereka tidak mengetahui ramuan yang dapat digunakan untuk membuat obat kejantanan

yang dapat digunakan untuk mencegah kehamilan.

### KESIMPULAN

Gejala semakin permisif di kalangan remaja selain melanda remaja perkotaan juga menggejala pada remaja di pedesaan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, pembuat kebijakan, orang tua, pendidik, dan anggota masyarakat pada umumnya. Selain itu, melihat gejala permisif yang berkembang di lingkungan remaja, informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja juga perlu dikembangkan baik untuk perkotaan maupun untuk remaja pedesaan.

Penelitian ini memperlihatkan besarnya peranan teman sebaya dalam pembentukan pengetahuan para remaja, termasuk berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan reproduksi. Informasi yang diperoleh dari teman sebaya dipercaya oleh remaja sebagai sumber informasi yang akurat, padahal informasi yang berkembang di kalangan remaja itu belum tentu kebenarannya. Namun, penelitian ini tidak melakukan pengujian terhadap efektivitas informasi pengetahuan yang berkembang di kalangan para remaja.

Terdapat variasi pengetahuan dikalangan remaja yang diteliti. Hal ini menurut Tyler (1987) sebagai *intracultural variations*. Penyebab perbedaan pengetahuan itu antara lain disebabkan oleh faktor usia dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing remaja. Remaja dengan usia yang lebih tua dan pengalaman yang lebih banyak cenderung memiliki pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan teman-teman lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beni, R. 1995. *Kesehatan Reproduksi Remaja: Ikhtiar Meretas Mitos*. Warta Demografi. 25(4).
- Browner, Carole H dan Carolyn F. Sargent. 1990. *Anthropology and Studies of Human Reproduction. Medical Anthropology: Contemporary Theory and Method*. USA: Greenwood Publishing Group.
- Khisbiyah, Y. 1995. *Konsekuensi Psikologis dan Sosial-ekonomi Kehamilan Tak Dikehendaki Pada Remaja*. Populasi. 6 (2).
- PKBI, PPK UGM, dan Ford Foundation. 1996. *Hak-Hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi*. 7 (10).
- Saifuddin, A.F. dan I.M. Hidayana. 1999. *Seksualitas Remaja*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sciortino, R. 1995. *Pendekatan Sosial dalam Penelitian Kesehatan Reproduksi*. Populasi. 6 (2).
- Tyler, S. A. 1987. *Cognitive Anthropology*. Illinois: Waveland Press Inc., USA.
- United Nations Population Fund. 1994. *Ringkasan Program Aksi Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan*. USA: UNFPA.

# FAKTOR EKONOMI DAN KEINGINAN BERPRESTASI MASYARAKAT PADANG LAWAS BERMIGRASI KE KOTA MEDAN

Ahmad Hidayah Dlt

**Abstract:** This article was the result of study about migrant or people migrate in Medan that come from Padang Lawas. This study was done with qualitative approach and descriptive analysis method and the analysis of unit is migrant who came from Padang Lawas with the key informan is permanent migrant who have lived in Medan for more than five (5) years. Basic on data which get from the field, it show that migrant who come from Padang Lawas migrate to Medan and others major city in Indonesia not only caused by economic factor but also achievement desire by education increase, find the chance of work as stateown employee or private employee and another work in Medan. There are many migrant from Padang Lawas have successfully financial and get various profession in Medan. They have return routinity to their village in certain moment, like: celebrate lebaran etcetera. The people that return in condition that more prosperous than before make a trend for the society, particularly for young generation in Padang Lawas who have finished their senior high school and follow the footstep of migrate people to major cities in Indonesia, especially in Medan.

**Keywords:** migration, economic factor, achievement

## PENDAHULUAN

Munir dalam Koentjaraningrat (1992: 160) mengatakan bahwa “migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang melintasi batas wilayah tertentu”. Pada umumnya, migrasi ke kota besar dilakukan selain sebagai proses pendewasaan bagi generasi muda, juga dilakukan untuk mencari penghidupan yang lebih baik dari desa asalnya. Inilah yang dilakukan oleh generasi muda Padang Lawas, terutama yang telah menamatkan pendidikan menengah yang tidak lagi dapat melanjutkan sekolahnya karena kendala dana, dengan bermigrasi memasuki kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, dan kota besar lain.

Gejala migrasi ini terlihat dari awal Orde Baru sampai dengan sekarang ini, rasa bangga sebagai penduduk di kota besar dan tidak bekerja sebagai petani di desa menjadi suatu obsesi bagi mereka. Hal ini dikarenakan di desa asal mereka, pendapatan sebagai petani dianggap tidak lagi memberikan masa depan yang lebih baik. Selain itu, disamping lahan pertanian yang terbatas, tidak ditemukan adanya alternatif pekerjaan di luar pertanian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang mendorong mereka untuk bermigrasi (merantau) ke kota-kota besar untuk mengadu nasib. Hingga saat ini, banyak diantara mereka yang telah

bekerja di perusahaan swasta, seperti; pabrik sepatu dan sandal, pasar swalayan, dan hotel. Sebagaian besar dari mereka menerima upah yang relatif minim, atau dapat dikatakan hanya cukup untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, tanpa bisa menabung. Mereka tetap bertahan karena menganggap pekerjaan tersebut sebagai batu loncatan, sembari menunggu peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik, atau bahkan menunggu kesempatan untuk menjadi pegawai pemerintahan (PNS).

Ada dua faktor utama yang menyebabkan mereka melakukan migrasi dari Padang Lawas ke kota Medan dan kota besar lainnya, antara lain:

1. Kebutuhan akan pekerjaan, yakni pekerjaan yang sifatnya tetap agar kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi dan adanya jaminan terhadap masa depan yang lebih baik.
2. Kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan keinginan untuk berprestasi dalam berbagai bidang profesi sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki.

Kedua faktor ini memiliki keterkaitan yang erat dengan migran yang berasal dari Padang Lawas, dimana dalam memenuhi tujuan-tujuan tersebut mereka rela menyesuaikan diri dalam lingkungan perkotaan, yang sangat jauh berbeda dengan kehidupan di daerah asal mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dijabarkan ke dalam 2 (dua) batasan, antara lain:

1. Bagaimanakah kemampuan adaptasi migran Padang Lawas dengan kehidupan perkotaan?
2. Apakah budaya asal mereka masih relevan digunakan dalam memperjuangkan keberadaan mereka di perkotaan, khususnya di kota Medan?

## PEMBAHASAN

### Kemampuan Adaptasi Migran Padang Lawas

Arus perpindahan dari desa ke kota dipandang sebagai salah satu faktor penyebab utama terjadinya proses urbanisasi. Faktor penyebab terjadinya arus perpindahan (migrasi) dari desa ke kota sering dicakup dengan istilah faktor pendorong dan faktor penarik atau *push and pull factor* (Shoort, 1980: 206).

Faktor pendorong terjadinya migrasi dari desa ke kota disebabkan oleh kemiskinan di desa-desa. Penyebab kemiskinan tersebut, antara lain:

1. Tidak seimbang lahan pertanian yang mereka miliki dengan penambahan penduduk penduduk kategori usia produktif.
2. Minimnya penyediaan lahan persawahan baru yang dapat dikembangkan.
3. Keterbatasan dalam teknologi pertanian, serta minimnya alternatif lapangan pekerjaan baru diluar sektor pertanian.
4. Disamping harga produk yang berasal dari kota relatif lebih murah, membanjirnya hasil industri kota yang *instant* atau langsung siap pakai di pedesaan menyebabkan komoditi lokal yang dihasilkan oleh penduduk desa kalah bersaing.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan masyarakat Padang Lawas terpaksa bermigrasi ke kota-kota besar untuk mencari kehidupan baru meskipun mereka menyadari kesulitan-kesulitan yang akan mereka hadapi di daerah tujuan. Karena pada dasarnya kehidupan masyarakat kota jauh berbeda dengan kehidupan di kampung halaman mereka.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Shoort (1980). *Pertama*, kota memiliki daya tarik dalam bidang ekonomi. Para migran yang berasal dari desa berharap akan mendapat pekerjaan baru. Mereka juga menganggap bahwa di kota uang relatif mudah

dan langsung didapat, sedangkan di desa tidak ada mata pencaharian yang langsung menghasilkan uang.

*Kedua*, kota menyediakan berbagai lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat maupun spesifikasi pendidikan. Pada dasarnya migrasi yang dilakukan oleh orang-orang Padang Lawas ke kota-kota besar merupakan salah satu usaha untuk mengangkat posisi sosial mereka. Dengan bermigrasi ke kota mereka dapat bekerja di sana, selain itu peluang-peluang untuk berprestasi bagi setiap orang dengan berbagai jenis pekerjaan akan ditemukan di perkotaan. Hal inilah yang ditempuh oleh masyarakat usia produktif Padang Lawas - terutama bagi mereka yang berijazah SMA-, mereka menetapkan pilihan akan prestasi yang akan mereka jalani. Lebih lanjut, Mc. Cleland dalam Rakhmat (2000) mengatakan bahwa situasi tersebut dikatakan sebagai *need for achievement*, yakni sebuah keinginan untuk berprestasi yang dapat menimbulkan semangat *entrepreneurship* pada orang-orang yang berkeinginan untuk maju dan berwiraswasta - dan hal ini lebih mungkin dilakukan di kota.

*Ketiga*, kota mempunyai daya tarik karena fasilitas-fasilitas pendidikan yang relatif lebih baik, terutama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta sesuai dengan minat dan bakat (spesialisasi) yang mereka miliki, sedangkan hal ini tidak ditemukan di daerah asal mereka.

*Keempat*, bagi masyarakat tertentu, kota memberikan kesempatan untuk menghindarkan diri dari kontrol sosial (*social control*) yang terlalu ketat, atau bahkan kesempatan untuk mengangkat diri dari posisi sosial yang rendah. Pada masyarakat Padang Lawas, status sosial masih dilihat berdasarkan garis keturunan (*ascribed status*) dan mobilitas sosial yang terjadi tak jarang bersifat tertutup. Posisi sosial *hatabon* yang rendah masih menjadi pertimbangan dalam masyarakat, sedangkan bagi masyarakat kota hal itu tidak lagi dipersoalkan. Mobilitas sosial cenderung bersifat terbuka, sehingga status sosial seseorang ditentukan oleh tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, ataupun jabatan dalam pemerintahan maupun swasta.

*Kelima*, Selama perkembangannya kota memiliki daya tarik sebagai pusat kesenangan atau hiburan, serta sebagai tempat dimana orang dapat mencari pengalaman baru dalam bayangan

suasana yang mereka anggap hangat dan meriah (Schoorl, 1980: 267).

Apa yang diungkapkan oleh Schoorl diatas sangat sesuai dengan lingkungan perkotaan, namun ada sebuah kendala yang harus dihadapi para migran, yakni proses adaptasi. Pada umumnya kehidupan kota sangat berbeda dengan kehidupan didesa, sehingga mereka yang bermigrasi ke kota harus beradaptasi dengan nilai-nilai sosial yang terdapat pada kota tersebut. Lebih lanjut, Tonnie dalam Abdulsyani (1992: 111) mengemukakan nilai-nilai yang umumnya dimiliki oleh kota, antara lain:

1. Impersonal.
2. Formal.
3. Kontrak tertulis.
4. Nilai guna (utilitarian),
5. Realistik
6. Khusus

Dikatakan impersonal karena interaksi tidak lagi didasarkan pada pribadi seseorang, akan tetapi lebih kepada fungsi seseorang dalam masyarakat. Hubungan bersifat formal, diatur sesuai dengan aturan-aturan yang jelas, seperti perjanjian-perjanjian kontrak tertulis, dan hubungan baru dapat terjadi apabila dilandasi dengan nilai guna (untung-rugi) bagi mereka akan berbicara atau bertemu. Faktor realistik menjadi pedoman sebuah hubungan yang bersifat khusus tanpa ada intervensi pihak di luar mereka. Dari apa yang dikemukakan oleh Tonnie, terlihat bahwa kehidupan di kota ini adalah sebuah nilai yang harus diperhatikan dan diadaptasi mereka.

### **Relevansi Budaya Migran Padang Lawas di Kota Medan**

Pada umumnya, orang-orang yang bermigrasi dari Padang Lawas ke kota Medan mencari sanak keluarga mereka yang lebih dahulu bermigrasi dan telah menetap di kota Medan. Kondisi tersebut populer dengan istilah “menumpang hidup pada sanak keluarga” untuk sementara waktu hingga mereka dapat beradaptasi dengan baik dan mendapat pekerjaan tetap di kota Medan. Dengan demikian meskipun mereka berada di perantauan, akan tetapi mereka masih merasakan situasi yang sama dengan daerah asalnya.

Ada suatu kewajiban moral bagi perantau yang lebih dahulu dan sudah menetap di kota Medan atau kota besar lainnya, di sisi lain ada

keinginan diantara para pendatang baru untuk mengikuti jejak sanak famili yang menampung mereka yang telah lebih dahulu bermigrasi ke kota dengan menuai keberhasilan.

Senada dengan hal itu, Pelly (1994: 12) dalam penelitiannya tentang masyarakat Mandailing mengemukakan hal yang sama, yakni: “orang-orang Mandailing tidak menyesali perantau mereka yang gagal, sebaliknya mereka menyesali perantau mereka yang telah menetap di kota-kota besar, yang tidak memperlakukan saudara *sekampung* mereka dengan baik. Mereka memberlakukan sanksi-sanksi adat dengan mengatakan bahwa perantau yang telah menetap tersebut sebagai penyebab utama kegagalan mereka”.

Meskipun penelitian ini dilakukan pada orang-orang Mandailing yang bermigrasi ke kota Medan, akan tetapi kasus ini juga berlaku sama bagi orang-orang Padang Lawas. Sebagaimana masyarakat Mandailing, kegagalan perantau dalam masyarakat Padang Lawas bukan dilihat berhasil tidaknya dia di perantauan, akan tetapi dinilai dari mampu atau tidaknya mereka memberikan bantuan kepada saudara *sekampung* mereka yang baru merantau. Sanksi yang diberlakukan bagi mereka yang telah mapan lebih berat daripada perantau yang gagal. Ketika perantau-perantau yang sudah berhasil di kota-kota besar pulang ke Padang Lawas, mereka tidak disapa lagi oleh saudara *sekampung* mereka, terutama apabila anak mereka tidak diurus, atau diperlakukan sesuai apa yang mereka harapkan. Mereka yang telah berhasil dan tidak mau membantu saudara *sekampung* diumpamakan dengan “lupa kacang akan kulitnya”.

Koentjaraningrat (1996: 115) menjelaskan bahwa gerak migrasi suku-suku bangsa yang telah berlangsung sejak dahulu telah mempertemukan berbagai kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga terjadi pengenalan mereka dengan unsur-unsur kebudayaan asing, atau biasa disebut *acculturation* atau *cultur contract*. Ini semua menyangkut konsep mengenai proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri itu.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa mereka yang telah menetap di kota Medan mulai membentuk asosiasi margamarga, baik atas nama desa asal, maupun margadana dan *boruna* untuk melestarikan budaya desanya. Hal ini dapat dilihat pada acara-acara adat, seperti *siriaon*, prosesi pernikahan adat, dan sebagainya. Hingga saat ini, struktur dan fungsi kekerabatan tersebut berperan dengan sangat baik dalam masyarakat mereka. Berkaitan dengan hal itu, Tonnies dalam Abdulsyani (1992: 110) mengatakan bahwa hubungan kekerabatan *gemeinschaft* terbagi dua, antara lain:

1. *Gemeinschaft by blood*, yaitu hubungan kekerabatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan, contoh; keluarga, kelompok kekerabatan, dan sebagainya.
2. *Gemeinschaft of place*, yaitu ikatan kekerabatan yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggalnya, sehingga menimbulkan pola hubungan saling tolong-menolong, contoh: Rukun tetangga, rukun warga, dan arisan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dilihat bahwa meskipun masyarakat Tapanuli Selatan berada di kota Medan atau di kota-kota besar lainnya, ada beberapa hal yang masih dipertahankan, yakni; pengaruh budaya desa asal masih ada yang tetap dilestarikan pada masyarakatnya, baik antar etnis Padang Lawas yang bermukim di Medan maupun antara warga yang berdekatan rumah dengan suku atau etnis lainnya selagi membawa kebaikan di tengah masyarakatnya menurut kebutuhan mereka.

Meskipun mereka telah lama menetap, akan tetapi hubungan kekerabatan masih dijaga dengan baik, hal ini terlihat dari bagaimana mereka (*migran permanent*) tetap memelihara sistem kekerabatan, mereka menunjukkan pola hubungan resiprositas (saling memberi) dalam berbagai hal, salah satunya adalah dengan memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk-bentuk tertentu. Mereka senantiasa mendahulukan kelompok kekerabatan mereka, inilah yang menyebabkan mengapa mereka (para migran) selalu berjuang untuk menduduki posisi penting di pemerintahan, BUMN, maupun di perusahaan swasta lainnya. Karena hanya dengan upaya-upaya itu mereka yang telah menetap (*migran permanent*) tersebut dapat membantu dengan memberikan kesempatan bagi kerabat mereka yang masih menganggur untuk mendapatkan pekerjaan.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa nilai-nilai etnisitas dan hubungan kekerabatan terbawa ke kota Medan seiring dengan menetapnya perantau (migran) tersebut. Berkaitan dengan hal itu, Harold Ishac dalam Abdillah (2002: 115) mengatakan bahwa *Group identity and political change* menelusuri *lebens welt* etnisitas mulai dari struktur tubuh, nama, bahasa, sejarah, asal usul, kepercayaan dan kebangsaan. Elemen-elemen itulah yang memegang peranan dalam proses interaksi sosial dan politik.

Dalam hal proses identifikasi etnis, yang harus dicermati adalah kepentingan suatu kelompok identitas untuk saling menjaga atau saling mengamankan (*securitisation*) identitas mereka yang selalu mengiringinya. Persoalan mengapa identitas kelompok sosial dirasa harus selalu dijaga, berkaitan dengan usaha identitas-identitas itu untuk tampil dan menjadi isu dalam kelangsungan kebudayaannya (Ubed Abdillah, 2002: 116).

## PENUTUP

1. Migrasi dari desa Padang Lawas sangat berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi, untuk memperoleh pekerjaan tetap, dan akhirnya menjadi penduduk yang bermukim di kota Medan.
2. Faktor pendorong dan penarik (*push and pull factor*) terjadinya migrasi dari daerah Padang Lawas ke kota Medan, yakni; sulitnya mendapat lapangan pekerjaan di desa, dan adanya suatu harapan bahwa lapangan pekerjaan di kota lebih menjanjikan sehingga mereka memutuskan migrasi ke kota Medan, ataupun kota lainnya.
3. Pengaruh budaya asal ikut terbawa ke kota Medan atau kota lainnya, yang menyebabkan dibentuknya kelompok-kelompok sosial (*social group*) berdasarkan pertalian darah; margadana, *boru*, dan *berena*. Sehingga budaya ini tidak hanya terlihat pada acara-acara adat seperti *silulutan* dan *siriaon* di kota Medan dan kota besar lainnya, tetapi juga dalam upaya memberi pekerjaan bagi migran asal Padang Lawas lain yang masih menganggur di kota Medan.
4. Faktor edukasi, yakni; melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pengembangan minat, serta adanya keinginan untuk berprestasi ikut mendorong terjadinya migrasi dari Padang Lawas ke kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematis, Teori, dan Terapan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Koentjaningrat. 1982. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jembatan: Jakarta.
- .1996. *Pengantar Antropologi*. Rineka Cipta: Jakarta
- Pelly, Usman. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. LP3ES. Jakarta.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2000. *Rekayasa Sosial*. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Schoort, J. W. 1990. *Modernisasi*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

# PLURALISME HUKUM PADA KASUS PERKAWINAN SEMARGA PADA ETNIS PADANG LAWAS DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Effiati Juliana Hasibuan  
Hottob Harahap

**Abstract:** Legal pluralism was happened in the Batak Padang Lawas ethnic. Batak Padang Lawas was not the only obedience Law in those society. The Laws was disordered by the marriage between one clan cases. Marriage in one clan was forbidden according to Batak Padang Lawas Laws.

The permitting marriage according to Batak Padang Lawas Laws (eksogami) was a marriage in different clan between man and woman. If the law breakers did not obey the rules, they must be punished by cutting a big male-cow. This clan punishment was done as an awareness to the society with holding Dalihan Natolu and the other clan leaders. So in this case the forbidden married case could be discussed and solved by the Batak Padang Lawas Laws. In the one clan married case, the law breaker who could not pay the sanction would be disposed by UU No 1/1974 about Married Laws in Indonesia.

**Keywords:** one clan marriage, legal pluralism, clan punishment

## PENDAHULUAN

Padang Lawas adalah sebuah sub kelompok etnis Batak yang berdiam di Kabupaten Tapanuli Selatan. Menurut Castles (2001) di bagian selatan Batak Toba (Mandailing dan Padang Lawas), berdiam kelompok yang sering dianggap terdiri dari dua sub kelompok, yakni Angkola dan Mandailing. Lebih lanjut, pada saat ini kelompok tersebut lebih dikenal sebagai kelompok Batak Tapanuli Selatan.

Castles menjelaskan bahwa Padang Lawas termasuk ke dalam etnis Batak yang disebutnya Batak Tapanuli Selatan, hal ini dikarenakan banyaknya persamaan dalam hukum adat, seperti; perkawinan (*Adat Pardongan Saripe*), dan sebagainya. Lebih lanjut, karena termasuk ke dalam sub etnis Batak, bentuk perkawinan diantara orang Padang Lawas adalah eksogami (perkawinan diluar kelompok suku tertentu). Berkaitan dengan hal itu, Vergouwen (1986) menegaskan bahwa “orang tidak akan mengambil istri dari kalangan kelompok *agnata* sendiri, perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami”.

Berdasarkan kedua pendapat diatas jelas bahwa Padang Lawas adalah sebuah sub etnis yang berasal dan memiliki kesamaan budaya dengan etnis Batak, sehingga adat (hukum perkawinan) mereka mempedomani hukum perkawinan Batak, yaitu larangan perkawinan semarga.

Dalam sejarah selama tahun 1820-1836 dibawah komando *hulubalang Tuanku Rao*, pasukan Padri dari Minangkabau menyerang dan kemudian menguasai daerah Mandailing. Penduduk desa yang tidak mau memeluk agama Islam atau tidak mengikuti perintah-perintah pasukan Padri akan dijarah harta bendanya dan dibunuh, sehingga dapat dipastikan bahwa rakyat Mandailing selanjutnya berada di bawah pengaruh pasukan-pasukan Padri (Pelly, 1994).

Saat pendudukan Mandailing berakhir dengan kekalahan Padri di Minangkabau pada 1937, Tuanku Tambusai, salah seorang *hulubalang* Padri melarikan diri dari Mandailing ke Angkola, pasukan Belanda mengejanya dengan melintasi pegunungan Bukit Barisan hingga ke lembah sungai Barumon, mereka menyusuri distrik Padang Lawas sampai ke Kota Pinang, dan setelah sepuluh hari dalam pengejaran *Tuanku Tambusai* berhasil menghilang tanpa diketahui jejaknya (Pelly, 1994).

Setelah hal ini terjadi, kekuasaan Padri di daerah Padang Lawas berpindah ke tangan Belanda. Belanda mengangkat *huria* sebagai pengetua adat sekaligus pemegang kepala pemerintahan di desa-desa yang mendapatkan gaji dari Belanda. Meskipun tidak semua *huria* memeluk agama Islam, akan tetapi merekalah yang akan menegakkan hukum adat termasuk hukum perkawinan Batak di Padang Lawas.

Menurut hukum adat Batak, perkawinan semarga antara wanita dan pria adalah sebuah

larangan berat, sebab perkawinan semarga itu sama dengan mengawini *tutur iboto* atau saudara sendiri (sumber: hasil penelitian, 2002). Akan tetapi, ditemukan juga adanya pertentangan antara pengaruh adat yang melarang perkawinan semarga dengan ajaran agama Islam peninggalan Padi yang tidak melarang perkawinan semarga.

Etnis Batak memiliki ketertarikan tersendiri untuk diteliti, akan tetapi agar penelitian ini tetap fokus diperlukan pembatasan masalah. Lebih lanjut, permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penyelesaian hukum perkawinan semarga dalam masyarakat Batak di Padang Lawas Tapanuli Selatan?”.

## PEMBAHASAN

Pluralisme hukum adalah suatu keadaan dimana terdapat lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial. Lebih lanjut menurut Griffith, dalam kenyataan sehari-hari dimana sistem hukum bekerja dalam arena sosial, terjadi interaksi yang tidak dapat dihindarkan antara hukum negara dengan berbagai hukum lainnya meskipun situasi pluralisme hukum secara potensial memang merupakan situasi konflik antara sistem-sistem hukum yang saling berbeda, baik bentuk, struktur, isi, fungsi politik dan efektivitasnya, namun tidak berarti harus selalu memunculkan konflik, karena ada juga terjadi saling mempengaruhi dan adaptasi (Griffith, 1986).

Defenisi Griffith memiliki keterkaitan dengan hukum perkawinan dalam masyarakat Batak, menurut Vergouwen (1986) perkawinan yang dibenarkan diantara orang Batak adalah perkawinan dengan orang di luar kelompok (eksogami). Seorang pria tidak boleh mengambil istri dari kelompok *agnata* sendiri. Perempuan yang telah menikah akan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami dan akan terus menyandang nama marganya (perempuan dari marga Siregar adalah tetap menjadi boru Regar walaupun sudah menikah dengan marga lain), kemudian sang suami untuk seterusnya akan menyebut kerabat isteri sendiri sebagai *hula-hulanya*. Jadi jelaslah bahwa perombakan marga bagi istri yang kawin tidak ada ketentuannya menurut adat Batak.

Pada masyarakat Batak (khususnya sub etnis Batak Padang Lawas, Sipirok, Angkola dan Mandailing) terdapat aturan-aturan adat yang

mengatur tentang perkawinan, aturan tersebut adalah sebuah pedoman hidup bagi mereka untuk menghindari terjadinya perkawinan sumbang (*incest*) yang sangat terlarang, baik dalam adat, maupun dalam agama.

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa apabila dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengaturan kelakuan manusia yang berkaitan antara manusia dengan kebutuhan seksnya. Dikemukakan pula bahwa perkawinan mempunyai beberapa fungsi lain yakni; untuk memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, harta, gengsi dalam masyarakat, serta untuk memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak (Koentjaraningrat, 1980). Berdasarkan pendapat Koentjaraningrat, dapat dipahami bahwa setiap kelompok etnis atau masyarakat, budaya yang mereka anut, pengaturan perkawinan, hubungan seks, memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi tidak terkecuali di masyarakat Padang Lawas, sebagai sub etnik Batak.

Sama halnya dengan masyarakat Padang Lawas, masyarakat Sipirok juga menerapkan larangan perkawinan semarga. Pembatasan jodoh dan perkawinan didasarkan pada prinsip eksogami, hingga saat ini prinsip perkawinan eksogami marga itu terus diikuti oleh sebagian besar dari anggota masyarakat Sipirok meskipun agama Islam atau agama Kristen yang mereka anut tidak melarang perkawinan antara orang-orang yang semarga.

Terlarangnya orang-orang semarga melakukan perkawinan menurut prinsip adat masyarakat Sipirok, adalah karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama, oleh karena itu mereka dipandang sebagai orang-orang yang sedarah atau *markahanggi* (berabang-adik).

Apabila orang-orang semarga melakukan perkawinan mereka dipandang melakukan hubungan sumbang (*incest*) yang sangat dilarang oleh adat. Pada masa dahulu orang-orang yang melakukan *incest* segera dikucilkan atau diusir dari suatu komunitas *huta*, dan komunitas *huta* lain juga biasanya tidak akan mau menerima mereka menjadi warganya (Lubis, 1998).

Tinjauan agama Islam, tentang batasan orang-orang yang tidak boleh dikawini diungkapkan oleh Hamid (2000), bahwa “wanita-wanita yang dilarang dinikahi disebut muhrim apabila hal ini dilanggar, maka pernikahannya

tidak sah dan hubungan mereka tergolong dalam perbuatan zina". Adapun wanita yang tidak halal dinikahi ada 14 macam terbagi dalam empat golongan antara lain:

*Pertama*, tujuh orang dari keturunan, antara lain; (1) ibu, ibu dari ibu, ibu dari bapak, hingga garis keturunan keatas seterusnya; (2) anak, cucu, dan keturunan kebawah seterusnya; (3) saudara wanita seibu seapak, atau seibu saja, dan seapak saja; (4) saudara wanita dari bapak; (5) saudara wanita dari ibu; (6) anak wanita dari saudara laki-laki; (7) anak wanita dari saudara wanita.

*Kedua*, dua orang dari sebab *Rodla'ah* (sepesusuan), yakni; (1) ibu yang menyusui, sekalipun bukan ibu kandung kita, dan; (2) saudara wanita satu susuan.

*Ketiga*, empat orang dari sebab *Mushaharoh* atau perkawinan, yaitu; (1) ibu dari istri atau ibu mertua; (2) anak tiri, apabila sudah pernah mengawini ibunya; (3) istri dari anak kandung (menantu); (4) istri dari bapak (ayah kandung).

Sedangkan *Keempat*, Satu orang dari sebab *jama'* atau berkumpul, yaitu saudara wanita dari istri yang masih hidup.

Bagi penganut agama Islam 14 macam orang-orang inilah yang dilarang untuk dinikahi, bila keluar dari 14 macam larangan ini boleh dinikahi. Di masyarakat Padang Lawas, 99% adalah penganut agama Islam. Dengan demikian konsistensi mereka sebagai penganut ajaran Islam dalam hal mengawini wanita ikut berpengaruh, disamping budaya adat yang mereka miliki.

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, data primer diperoleh dengan metode observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data pelengkap diambil dengan melakukan studi kepustakaan. *Key informan* ditetapkan, antara lain; mereka yang melakukan perkawinan semarga, dan pengetua adat di desa mereka di Padang Lawas (Desa Aek Suhat). Lebih lanjut, *Key informan* terdiri atas:

1. Pelaku perkawinan semarga (antara suami istri semarga) yaitu sama-sama bermarga Harahap.
2. Pelaku perkawinan semarga (antara suami istri semarga) yaitu sama-sama bermarga Siregar.

3. Pengetua adat desa yang disebut juga pemilik *huta*, dimanfaatkan sebagai sumber informasi karena merupakan orang yang terlibat langsung dalam upaya penyelesaian kasus hukum adat pada kasus perkawinan semarga ini.

## DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaku perkawinan semarga memahami kalau perkawinan yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan hukum adat, tetapi sebaliknya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perkawinan semarga umumnya dilakukan atas dasar cinta sehingga para pelaku siap menerima sanksi adat yang berlaku di desa mereka. Berkaitan dengan hal itu, berlaku istilah yang mereka pedomani dalam perkawinan, yaitu:

*Salak-salak namata*

*Ima salak natonggina*

*Anggodung disolong mata*

*Ima halak najogina*

yang berarti,

*Buah salak yang mentah*

*Itulah salak yang paling enak*

*Bila sesuai dengan pandangan mata*

*Itulah orang yang paling cantik didunia*

Pada awalnya, perkawinan semarga didasarkan pada kesamaan pandangan untuk membangun sebuah rumah tangga sampai akhir hayat mereka. Keluarga mempelai memberi jawaban yang sama, bahwa mereka tidak menyetujui apabila anak-anak mereka melakukan perkawinan, hal ini disebabkan struktur masyarakat Padang Lawas masih tetap memegang teguh konsep *Dalihan Natolu*.

Nilai-nilai inilah yang mempengaruhi upacara perkawinan adat, dimana upacara tersebut melibatkan *mora* (si pemberi wanita), *anak boru* (penerima boru) *kahanggi*, dan *pisang raut* (boru dari anak boru), sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk perkawinan ideal bagi mereka adalah eksogami.

Lebih lanjut, persoalan adat hanya bisa diselesaikan melalui keterlibatan struktur tersebut yaitu dengan keterlibatan pengetua adat dan *dalihan natolu*, sehingga perkawinan atau *pabagas boru* harus menggunakan jalur adat ini. Boru yang akan kawin harus *dikhobari*, baru dianggap sah di dalam kehidupan masyarakat

Padang Lawas. Untuk menebus proses adat ini, mereka yang melanggar menerima konsekuensi dengan diharuskan membayar sanksi adat, antara lain:

1. Membayar sanksi adat kepada calon mertua, keluarga dan pengetua adat dengan memotong seekor kerbau jantan besar yang dimakan bersama-sama dengan melibatkan *Dalihan Natolu*, dan diumumkan ditengah masyarakatnya, bahwa upacara tersebut adalah pembayaran sanksi adat tentang kawin semarga.
2. Wanita yang kawin semarga dengan suami, harus merombak marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat.
3. Berdasarkan struktur adat, marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri, setelah penetapan marga tersebut, maka si isteri akan menjadi kelompok *mora* si suami (marga ibu dari suami) dan bukan lagi kelompok marga orang tuanya.
4. Bila ada keturunan mereka anak lelaki dikemudian hari, anak lelaki tersebut tidak dibenarkan mengambil *boru tulang* (*boru* dari saudara laki-laki istri).

Setelah mereka membayar sanksi adat, kemudian prosesi dilanjutkan dengan acara *markobar boru* dengan melunasi utang adat *boru*, dan kemudian dilakukan pernikahan menurut Islam.

Apabila orang yang kawin semarga tidak mempunyai kemampuan untuk membayar sanksi adat, maka sesuai aturan yang ada mereka akan diperlakukan sangat rendah dalam komunitasnya. Hal inilah yang sering mengakibatkan terjadinya perselisihan antara keluarga lelaki dengan keluarga perempuan yang akan kawin sebab keluarga perempuan ikut menerima sanksi adat ini seolah-olah anak perempuan mereka tidak dihargai oleh pengetua adat dan *Dalihan Natolu*.

Dalam hal ini, solusi pertama yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan aturan hukum di luar adat, yakni dengan memfokuskan perkawinan menurut ajaran Islam dengan mengambil para *ustadz* atau petugas nikah dengan menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Islam, serta memenuhi syarat nikah menurut Islam, antara lain:

1. Ada calon suami dan isteri
2. Ada wali nikah
3. Ada ijab kabul
4. Ada mahar (sebesar permintaan calon isteri)
5. Ada dua orang saksi nikah, (dilengkapi izin orang tua bila ia berada di bawah umur 21 tahun dan kelengkapan surat ini harus disetujui Kepala Desa).

Dalam kasus ini, baik keluarga pihak laki-laki maupun pihak perempuan hanya mengadakan upacara kenduri menurut agama Islam, membuat doa selamat dengan mengundang keluarga-keluarga dan jiran tetangga dalam jumlah terbatas untuk memanjatkan upacara doa restu kepada kedua mempelai tanpa proses adat yang ada di Masyarakat Padang Lawas.

Berdasarkan wawancara dengan pengetua adat, diketahui bahwa jika yang bersangkutan tidak mampu atau tidak memanfaatkan jalur adat *parkobaran boru* menurut adat maka solusi kedua yang dapat ditempuh adalah melalui musyawarah antara pengetua adat dan *Dalihan Natolu*, dengan mempertimbangkan ketidakmampuan si pelanggar dalam bidang ekonomi. Berkaitan dengan hal itu, dalam masyarakat Padang Lawas dikenal istilah sebagai berikut:

*Unduk-unduk di toru bulu*

*Muda dung tunduk inda tola di bunuh*

yang artinya,

*Tunduk-tunduk di bawah bambu*

*Orang yang minta ampun tidak boleh-dibunuh*

Istilah tersebut mengacu bagi orang yang berbuat salah, apabila ia telah mengaku salah, maka orang tersebut tidak boleh dibunuh (dihukum). Contoh: Bagi yang tidak mampu membayar utang adat seekor kerbau jantan, dapat diganti dengan seekor kambing jantan besar sebagai pengganti tetapi dengan syarat yang bersangkutan memang betul-betul tidak mampu menyediakan seekor kerbau.

Sementara itu ditemukan juga kasus dimana orang tua sengaja menyuruh anaknya yang melakukan perkawinan semarga (melanggar adat) bermigrasi ke kota dengan harapan bila suatu saat anaknya telah mempunyai harta kekayaan dan mampu menyelesaikan utang adatnya, anak tersebut diperkenankan kembali ke desa untuk membayar sanksi adatnya. Dalam hal

ini, terjadi pluralisme hukum dimana perkawinan semarga tidak lagi dipengaruhi oleh sentralisasi hukum adat yang dominan, tetapi telah terjadi adaptasi dalam hukum adat yakni adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial.

Dalam kasus ini ada hukum adat Batak yang keras dengan memberi hukuman pengusiran dari desa (*huta*) bagi pelanggar. Tetapi di sisi lain ada juga pergeseran hukum adat dari denda memotong kerbau jantan, bisa dirubah dendanya menjadi kambing jantan, dan yang terakhir oleh hukum negara lebih mudah lagi, memperbolehkan kawin semarga asal tidak dengan muhimnya. Hal ini sesuai dengan ajaran islam yang memiliki kekuatan hukum sesuai UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam hal ini terlihat, bahwa seseorang dapat memilih hukum mana yang ia kehendaki untuk selanjutnya digunakan sesuai dengan kepentingan pribadinya, tentunya dengan pertimbangan rasional hukum mana yang dianggap paling menguntungkan bagi diri si pelaku sendiri.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Padang Lawas, sebagai sebuah kelompok etnis Batak Tapanuli Selatan, telah mengalami proses pluralisme hukum yang berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat mereka. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya perkawinan semarga yang dianggap sebagai pelanggaran hukum adat perkawinan akan bergeser menuju penyesuaian hukum adat perkawinan baru yang lebih fleksibel sesuai dengan nilai yang mereka anut dalam arena sosial mereka. Interaksi dan adaptasi hukum akan mewarnai kehidupan mereka di kemudian hari. Pengaruh luar atau budaya kota serta kemajuan berfikir akan ikut mewarnai budaya baru tersebut, apalagi jika dihubungkan dengan perkembangan arus informasi dan komunikasi, baik dalam skala nasional maupun internasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Castles, Lance. 2001. *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera Tapanuli 1915-1940*. Rawamangun.
- Editor E.K.H. Masinambou. 2000. *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hamid, Syamsul Rizal. 2000. *Buku Pintar Agama Islam*. Jakarta: Penebar Salam.
- Ihromi, T. O. 2001. *Antropologi Hukum. Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lubis, Z. Pangaduan, cs. 1998 *Sipirok Na Soli: Bianglala Kebudayaan Sipirok*. Medan: BPPS dan USU.
- Natsir, H. Muchtar, cs. 1980. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Bimas dan Urusan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam Jakarta.
- Pelly, Usman. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi Peranan Missi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: LP3ES.
- Vergouwen, J. C.. 1986. *Masyarakat dan Hukum adat Batak Toba*. Jakarta: Pustaka Azet.

# PENYAMPAIAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT KEPADA KHALAYAK

Fenni Khairifa

**Abstract:** Television is the one of communication media that have fluency in society. Besides of giving information, education, and entertainment, Television is also always to use for giving conciousness to people about all of currency issue. These are being act by society service advertisement. The research's purpose is used to find out the answer about is it the society service advertisement was shown by Television was being watched by audience and how the understanding's audience to the society service advertisement. All of the data's research is taken from research method by using questioner in questionnaire's forms. The two of differences research was done to research the audience acceptance of the society service advertisement about the health and the safety on the roadway. The research's result is showing that 9 of 10 respondent ever saw the society service advertisement was research by Television. However the amount of them who can understand and know well the society service advertisement is still little. Beside of that, some of the watchers Television said that the messages in the society service advertisement is still hard to be understood. Therefore, the Television has to continously to playing the society service advertisement and need for taking the steps to making easier in audience's understanding on messages of the socety service advertisement was shown by Television.

**Keywords:** society service advertisement, television

## PENDAHULUAN

Sejak siaran Televisi mulai diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 60-an, Televisi telah menjadi penghuni tetap di berbagai rumah dan menjadi pusat kegiatan keluarga pada waktu senggang. Keadaan ini bertambah semarak dengan hadirnya Televisi swasta, maka masyarakat di Indonesia mempunyai beragam pilihan untuk memperoleh berbagai informasi tentang pendidikan dan beragam hiburan lainnya. Berbagai bentuk program dan siaran yang ditayangkan berbagai stasiun Televisi untuk khalayak seperti berita, drama, film, iklan, sinetron, hiburan, olahraga, dan berbagai jenis permainan lainnya. Terdapat juga program khusus untuk anak-anak, remaja, kaum wanita, dan program untuk tontonan semua lapisan masyarakat. Disamping itu, Televisi juga merupakan salah satu media komunikasi yang dimiliki oleh anggota masyarakat digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyampaikan pesan, dan memberi kesadaran serta pendidikan kepada khalayak. Salah satu cara yang dilakukan adalah memberi kesadaran dan pendidikan kepada khalayak melalui pesan iklan layanan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh iklan layanan masyarakat yang

disiarkan oleh beberapa stasiun Televisi swasta, terutama yang menyangkut cara hidup sehat, dan kampanye etika berlalu lintas.

Menurut media Guide (1998) iklan layanan masyarakat yang disiarkan melalui Televisi ditonton oleh 93,8% orang dewasa. Hasil penelitian ini dibahas dalam 4 bagian yang terdiri dari: bagian 1: menjelaskan tentang konsep iklan layanan masyarakat, diikuti bagian 2 tentang metode penelitian. Seterusnya untuk bagian 3 akan memaparkan hasil penelitian, sedangkan untuk bagian 4 peneliti merumuskan hasil penelitian dan mengemukakan beberapa saran.

### Konsepsi tentang Iklan Layanan Masyarakat

Iklan layanan masyarakat berasal dari konsep *Public Service Advertisement* yang kemudian dikenal dengan *Public Service Announcement* (PSA) yang pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat. Crompton dan Lamb (1986) mendefenisikan PSA sebagai iklan yang disiarkan melalui udara dan iklan tersebut disponsori oleh media berkenaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Kemudian Alcalay dan Taplin (1989) mengatakan bahwa PSA merupakan pesan radio atau Televisi dalam berbagai tempo waktu (biasanya 10, 15, 20, 30 atau 60 detik) yang mempromosikan program, pelayanan, peristiwa atau isu-isu yang menarik

perhatian dan minat masyarakat, dan pesan ini disponsori oleh instansi yang tidak mementingkan keuntungan.

Biasanya iklan layanan masyarakat merupakan bagian dari suatu kampanye besar yang melibatkan banyak media dan usaha-usaha lainnya dalam tempo waktu yang telah ditetapkan. Di antara kampanye-kampanye yang sering menggunakan iklan layanan masyarakat adalah kampanye tentang kesehatan dan keselamatan berlalu lintas. Tom (1993) dalam penelitiannya tentang iklan layanan masyarakat, menemukan saluran utama Televisi di Amerika menyiarkan iklan layanan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan (perlindungan dari penyalahgunaan narkoba, minuman keras, AIDS, dan kanker), menyayangi anak-anak dan orang-orang yang dicintai, kepentingan pendidikan, penggunaan sabuk pengaman, menangani tekanan jiwa, pemeliharaan binatang liar dan kesadaran tentang akibat binatang liar. Semua iklan layanan masyarakat ini disiarkan pada jam perdana di saluran ABC, CBS, dan NBC. Hal ini disebabkan karena Pfau dan Parrot menjumpai iklan layanan masyarakat yang disiarkan selain dari jam perdana atau di luar jam perdana kurang mendapat perhatian dan tidak memberi pengaruh seperti yang diharapkan. Perlu diketahui bahwa iklan layanan masyarakat bertujuan untuk memberi kesadaran kepada khalayak. Apabila mereka telah sadar terhadap masalah yang disiarkan melalui iklan layanan masyarakat, maka mereka akan melakukan perubahan dalam tingkah laku. Setelah terjadi perubahan tingkah laku di kalangan khalayak, maka dapatlah dikatakan iklan layanan masyarakat itu telah memberikan kesan dan kampanye tersebut mencapai sasarannya. Martyn (1997) menyarankan supaya iklan layanan masyarakat yang dirancang harus memperhatikan ciri-ciri demografi dan budaya kelompok sasaran agar hasilnya lebih efektif. Walaupun demikian, hal yang perlu diingat bahwa efektifitas sesuatu kampanye dan iklan layanan masyarakat itu tergantung kepada sampainya pesan iklan layanan masyarakat tersebut kepada khalayak atau kelompok sasaran. Tidak ada artinya kalau iklan layanan masyarakat itu menghabiskan biaya yang besar tetapi khalayak tidak melihatnya, atau pesan tersebut tidak mampu mempengaruhi khalayak.

### Metode Penelitian yang Digunakan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah iklan layanan masyarakat yang disiarkan melalui Televisi di Medan ditonton oleh khalayak atau tidak. Sekiranya ada yang menonton, berapa banyak mereka yang ikut menonton dan iklan layanan masyarakat manakah yang paling diingat oleh mereka. Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan 2 penelitian yang berbeda dengan menggunakan metode survei.

Penelitian 1 memberi perhatian terhadap iklan layanan masyarakat tentang kesehatan (penelitian 1). Sedangkan untuk penelitian berikutnya fokus perhatian diarahkan tentang iklan layanan masyarakat keselamatan berlalu lintas (penelitian 2). Kedua penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan Tuntungan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket yang dijawab sendiri oleh responden, setelah pra-uji dilakukan terhadap kuesioner yang berkenaan. Pemilihan responden terhadap kedua penelitian ini dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria sampel sebagai berikut:

- Responden pernah menonton iklan layanan masyarakat.
- Responden bertempat tinggal di lokasi penelitian.
- Responden berumur di atas 17 tahun.

Langkah berikutnya pemilihan sampel dilakukan secara *accidental sampling*, artinya siapa saja responden yang telah memenuhi kriteria di atas dipilih sebagai sampel, sehingga jumlah yang telah ditentukan terpenuhi. Mayoritas pertanyaan dalam kuesioner merupakan soal tertutup dengan meminta responden untuk memilih jawaban dari daftar pertanyaan yang disediakan. Penelitian 1 dilakukan terhadap 100 responden telah menjawab dan mengembalikan kuesioner dengan lengkap. Sedangkan untuk penelitian 2 juga dilakukan terhadap 100 responden, dan mereka juga telah mengembalikan kuesioner dengan lengkap. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan *Statistic Program for Social Science (SPSS) for Windows*, dan prosedur statistik deskriptif yang digunakan untuk membahas hasil penelitian secara sistematis. Untuk memudahkan pemahaman pembaca, hasil penelitian 1 dan hasil penelitian 2 dibahas secara terpisah.

### Hasil Penelitian 1

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% responden berumur diantara 20-25 tahun, dengan perbandingan jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu masing-masing 50 responden (50%) menonton iklan layanan masyarakat tentang kesehatan. Mayoritas responden berasal dari suku Karo (40%), Jawa (30%) dan sebagian yang lain suku Batak (10%), Melayu (10%) dan lain-lain sebanyak 10% yang terdiri dari suku Minang, Mandailing dan Cina.

Mayoritas mereka menonton lebih dari 10 jam dalam seminggu dan umumnya siaran yang ditonton adalah siaran Televisi swasta seperti: TPI, RCTI, SCTV, Indosiar dan ANTeve. Hanya sebagian kecil dari mereka yang menonton siaran TVRI (12%).

Adapun iklan layanan masyarakat tentang kesehatan yang pernah mereka tonton adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Iklan Layanan Masyarakat tentang Kesehatan yang Pernah Ditonton Melalui Televisi

Pesan	Jumlah	%
<b>Iklan Layanan Masyarakat</b>		
Pemakaian obat generik	92	92%
Penggunaan alat kontrasepsi	80	80%
Bahaya merokok	90	90%

N= 100 (100%)

Tabel 1 memperlihatkan bahwa tidak semua iklan layanan masyarakat tentang kesehatan ditonton oleh semua responden dalam jumlah waktu yang sama, dan hasil penelitian menunjukkan terdapat pesan iklan layanan masyarakat tentang kesehatan yang lebih menonjol dibandingkan dengan pesan iklan layanan masyarakat tentang kesehatan yang lainnya. Padahal tujuan dari iklan layanan masyarakat tentang kesehatan agar ditonton oleh semua orang.

Pemahaman responden terhadap pesan yang terkandung dalam iklan layanan masyarakat tentang kesehatan masih belum menggembirakan, masih banyak responden kurang memahami pesan implisit yang terkandung di dalamnya. Iklan layanan masyarakat tentang pemakaian obat generik dipahami oleh 35% responden, dan untuk penggunaan alat kontrasepsi dipahami oleh 41% responden, sedangkan untuk bahaya merokok hanya dipahami oleh sebagian kecil responden saja (21%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan-pesan yang disampaikan melalui iklan

layanan masyarakat tentang kesehatan masih sukar dipahami oleh responden. Seharusnya pemahaman dan kejelasan pesan iklan layanan masyarakat sangat penting, agar khalayak bersedia untuk mengadopsi pesan-pesan yang disampaikan.

### Hasil Penelitian 2

Sebanyak 100 orang telah menjadi responden dalam penelitian tentang keselamatan berlalu lintas. Dari jumlah ini suku Batak merupakan mayoritas responden (37%), selebihnya terdiri dari suku Karo (35%), suku Jawa (20%) dan selebihnya (8%) terdiri dari berbagai suku seperti: Minang, Melayu dan Mandailing. Batasan umur mereka diantara 20-51 tahun, dan mayoritas responden dalam penelitian ini berumur diantara 20-30 tahun, selebihnya mereka yang berumur diantara 31-40 tahun. Jumlah responden laki-laki sama banyaknya dengan jumlah responden perempuan, masing-masing 50 orang. Lebih separuh dari jumlah responden mempunyai sepeda motor (59%) dan mayoritas mereka mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi). Diantara mereka telah memiliki SIM lebih dari 10 tahun yang lalu (25%). Terdapat juga mereka yang baru memiliki SIM sekitar 1-3 tahun sebanyak 35%, dan mereka yang mempunyai SIM 4-6 tahun (2%), dan selebihnya 7-9 tahun (40%). Diantara mereka terdapat 61% pernah mengalami kecelakaan lalu lintas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 90% responden pernah menonton iklan layanan masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas seperti berikut ini:

Tabel 2.

Iklan Layanan Masyarakat tentang Keselamatan Berlalu Lintas yang Pernah Ditonton Melalui Televisi

Pesan	Jumlah	%
<b>Iklan Layanan Masyarakat</b>		
Pemakaian helm	96	96%
Penggunaan jembatan penyeberangan	84	84%
Penggunaan sabuk pengaman	92	92%

N= 100 (100%)

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil penelitian 2 tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian 1, dimana tidak semua iklan layanan masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas ditonton dalam jumlah waktu yang sama oleh responden.

Pemahaman responden terhadap pesan iklan layanan masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas diukur dengan meminta kesediaan responden memberi pendapatnya tentang pesan-pesan yang terkandung dalam iklan layanan masyarakat tersebut. Mayoritas responden (87%) memahami pesan dari iklan layanan masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas, namun sebagian di antara mereka kurang setuju dengan pesan tersebut, karena alasan menyusahkan terutama untuk penggunaan helm.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas khalayak menonton iklan layanan masyarakat yang disiarkan melalui Televisi. Walaupun demikian, masih terdapat di antara mereka yang tidak memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam iklan tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena khalayak tidak mencermati pesan-pesan iklan tersebut secara seksama, karena mereka lebih fokus untuk menyimak acara-acara yang menjadi favoritnya.

Pemahaman responden terhadap pesan-pesan iklan layanan masyarakat tentang

kesehatan (penelitian 1) tidak lebih baik dibandingkan pemahaman mereka terhadap pesan-pesan iklan layanan masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas, ini karena pesan-pesan yang terkandung dalam iklan layanan masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas sering dijumpai dan dilihat diberbagai tempat selain melalui Televisi, seperti: poster, spanduk, billboard, surat kabar, publikasi khusus, dan lain-lain.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa iklan layanan masyarakat yang disiarkan melalui Televisi sampai kepada khalayak, namun jumlah mereka yang dapat mengingat pesan-pesan dari iklan layanan masyarakat tersebut masih kurang. Sebagian dari responden kurang mampu mencermati pesan-pesan yang terkandung di dalam iklan layanan masyarakat. Oleh karena itu, media Televisi perlu secara kontiniu menyiarkan pesan-pesan iklan layanan masyarakat, disamping itu pesan-pesan yang terkandung dalam iklan layanan masyarakat harus lebih mudah dipahami. Sebaiknya iklan layanan masyarakat disiarkan juga pada jam perdana (*prime time*) agar tidak luput dari perhatian khalayak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A Guides to Sales Promotions*. 1998. London: ISBA.
- Brett William Lowe. 1993. *Periklanan yang Efektif (terjemahan)*. Jakarta: Gramedia.
- Coulson. Thomas, C.J.1987. *Marketing Communications*. London: Heinemann.
- Crompton, J.L. dan C.W.Lamb. 1986. *Marketing Government and Social Service*. New York: John Willey & Sons.
- Jefkins, Frank. 1997. *Periklanan (terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Joseph Klapper. 1960. *The Effect of Mass Communication*. New York. Free Press.
- Martyn P.Davis. 1997. *Effective Use of Advertising Media*. London: Hutchinson Business Book.
- Tom Brannan. 1993. *The Effective Advertiser*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Werlls.et.al. 1989. *Advertising: Principles and Practice*. New Jersey: Prentice Hall Inc.

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN KOPERASI  
CREDIT UNION DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(Studi Kasus: Koperasi Credit Union Partisipasi Sukamakmur  
Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang)**

**Nurlela Ketaren**

**Abstract:** This research is about the factors that influence The Credit Union Cooperation in community empowerment. The problem in this research is what are the factors that influence the success in Credit Union Cooperation “Partisipasi Sukamakmur” in community empowerment and how is the community empowerment concept through Credit Union Cooperation “Partisipasi Sukamakmur”.

This research used the quantitative and qualitative methods. The total population is the whole members of Credit Union Cooperation or 204 people. The number of debtors in this Credit Union is 80 people and 50% of them (40 people) became the sample of this research. From 40 people, the researcher chose 5 people whom the researcher thought that they have the deep and necessary knowledge to be informants.

Community empowerment through Credit Union Cooperation “Partisipasi Sukamakmur” has been done through the routine guidance average 36,62% (91,55%). The efforts are to improve value and prestige religious activity, social devotion and agriculture. The community empowerment oriented to create the self effort community (through the animal breeding activities) which has the similar interest to cooperate, identified the similar necessity to fulfill the similar necessity. Community Development in Credit Union Cooperative is the efforts to improve the quality of social life including economics, education, public health and social culture improvements. Therefore the factors that influence the success Credit Union Cooperation “Partisipasi Sukamakmur” have so great influences through the community empowerment that make it possible for its members to improve their social life quality and also can enlarge the influences in the process which influences the social economic and capital in Credit Union Cooperation.

**Keywords:** The factors of success Credit Union and community empowerment

## **PENDAHULUAN**

Salah satu lembaga yang sesuai dengan pembangunan masyarakat pedesaan dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat adalah koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi memiliki prinsip gotong royong, rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Organisasi koperasi yang diperlukan masyarakat adalah koperasi yang jujur dan dinamis sehingga potensi anggota dalam menghimpun dana dapat terwujud (Badaruddin dkk, 2005).

Pembangunan koperasi identik dengan mengatasi kemiskinan. Menurut Bung Hatta, koperasi yang berazaskan pasal 33 UUD 1945 merupakan satu-satunya jalan untuk mendekatkan jurang perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin (Mubyarto 2003:10).

Secara makro dapat dilihat peranan koperasi yang semakin melembaga dalam perekonomian, antara lain; meningkatnya

manfaat koperasi bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap azas, sendi serta tata kerja koperasi; meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan; meningkatnya pemerataan dan keadilan; meningkatnya kesempatan kerja. Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung pada *Co-operative Growth*, *Co-operative Share* dan *Co-operative Effect* yang melibatkan, memberdayakan segenap lapisan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan (Sukamdiyo, 1996).

*Credit union* diperuntukkan bagi setiap orang yang mau menciptakan *asset* dengan cara menabung dengan harapan hari esok akan lebih sejahtera. Konsep *credit union* sangat berbeda dengan, koperasi kredit, kartu kredit, mobil kredit, rumah kredit, dan barang-barang kredit lainnya. Barang-barang tersebut dilunasi secara perlahan-lahan tanpa memiliki nilai tabungan

didalamnya. Setelah lunas, selesai sudah kreditnya dan orang yang mempunyai kredit tersebut tidak punya asset atau modal. Sedangkan dalam *credit union*, nilai kredit tersebut justru menjadi aset dan menjadi modal yang disebut saham (Ngo. A. Petrus, 2004).

*Credit union* partisipasi Sukamakmur merupakan koperasi simpan pinjam yang memiliki program pendidikan, pembinaan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan. Setiap anggotanya adalah pilar-pilar yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan *credit union*. Partisipasi anggota diukur dari kesediaan anggota melaksanakan kewajiban dan melaksanakan hak anggota secara bertanggung jawab (Widiyanti N, 2002).

*Credit Union* Partisipasi sukamakmur berdiri 10 Februari 1994, jumlah anggota Desember 2004 sebanyak 204 orang, jumlah simpanan Rp 282.651.425, jumlah pinjaman Rp 410.512.200, jumlah asset Rp 524.052.998. Apabila keberhasilan *credit union* terlihat berdasarkan perkembangan jumlah unit, partisipasi (jumlah anggota), penggunaan pinjaman produktif, besarnya asset, dan besarnya sisa hasil usaha, maka *credit union* partisipasi Sukamakmur ini dapat dikatakan cukup berhasil.

Perkembangan Koperasi *credit union* di pedesaan sebagai lembaga ekonomi rakyat merupakan upaya pembangunan yang positif bagi masyarakat pedesaan. Dengan kata lain koperasi dipandang memiliki arti yang strategis pada masa yang akan datang (Mubyarto, 2003). Sesuai dengan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah "Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan koperasi *credit union* partisipasi Suka Makmur dalam pemberdayaan masyarakat?".

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan model analisa deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisa deskriptif berusaha menggambarkan model hubungan antara berbagai variabel dengan memberikan penafsiran ilmiah dan analisis yang logis atas hubungan antarfaktor. *Credit union* dinyatakan berhasil bila memenuhi enam variabel yang meningkat setiap tahun, yaitu; SHU, Partisipasi anggota, Pendidikan Pengurus,

Kepemimpinan Pengurus, Administrasi dan Manajemen, Pemberdayaan masarakat.

Populasi penelitian adalah seluruh anggota koperasi *Credit union* yang berjumlah 204 orang. Sedangkan sampel diambil lima puluh persen dari jumlah anggota yang meminjam kepada koperasi *Credit union* yaitu 40 orang. Dari sampel yang ada, dipilih informan yang mempunyai pengetahuan secara mendalam tentang masalah yang diteliti sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara. yang meliputi faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan *Credit union*, sedangkan lokasi penelitian adalah koperasi *Credit union* Partisipasi Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi *Credit union*, digunakan data kuantitatif memakai analisis tabulasi frekuensi dan persentase. Untuk data kualitatif digunakan teknik analisis reduksi data, dengan pengategorian data yang mempunyai makna untuk menarik kesimpulan dalam mencari faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sampel dalam penelitian adalah anggota koperasi Partisipasi Sukamakmur yang berjumlah 40 orang dengan komposisi sebagai berikut:

### Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin;

1. Responden laki-laki berjumlah 19 orang (47,5%).
2. Responden perempuan berjumlah 21 orang (52,5%).

### Komposisi responden berdasarkan usia;

1. Responden berusia 27-33 tahun berjumlah 14 orang (35%).
2. Responden berusia 34-40 tahun berjumlah 9 orang (22,5%).
3. Responden berusia 41-47 tahun berjumlah 12 orang (30%).
4. Responden berusia 48-54 tahun berjumlah 5 orang (12,5%).

### Komposisi responden berdasarkan tingkat pendidikan;

1. Tingkat pendidikan SD berjumlah 1 orang responden (2,5%).
2. Tingkat pendidikan SLTP berjumlah 2 orang responden (5%).

3. Tingkat pendidikan SLTA berjumlah 17 orang responden (42,5%).
4. Tingkat pendidikan DIII berjumlah 6 orang responden (15%).
5. Tingkat pendidikan S-1 berjumlah 14 orang responden (35%).

#### **Komposisi responden berdasarkan penggunaan pinjaman;**

1. Untuk keperluan pertanian berjumlah 5 orang responden (12,5%).
2. Untuk keperluan konsumsi dan kesejahteraan berjumlah 20 orang responden (50%).
3. Untuk keperluan peternakan berjumlah 10 responden (25).
4. Untuk keperluan berdagang berjumlah 5 orang responden (12,5%).

#### **Komposisi responden berdasarkan jumlah pinjaman;**

1. Rp 1.000.000,- hingga Rp 2.400.000,- berjumlah 6 orang responden (15%).
2. Rp 2.500.000,- hingga Rp 4.400.000,- berjumlah 12 orang responden (30%).
3. Rp 4.500.000,- hingga Rp 6.400.000,- berjumlah 17 orang responden (42,5%).
4. Rp 6.500.000,- hingga Rp 10.000.000,- berjumlah 3 orang responden (7,5%).
5. Rp 11.000.000,- hingga Rp 20.000.000,- berjumlah 2 orang responden (5%).

### **PEMBAHASAN**

Ginting (1999) mengatakan bahwa *credit union* lebih pesat dari KUD dalam laju perkembangan keragaan. Akan tetapi bisnis *credit union* relatif lebih kecil, dan hanya bergerak dalam usaha simpan pinjam. Berkaitan dengan hal itu, Marbun (1999) menyatakan bahwa Koperasi kredit memiliki peranan dalam meningkatkan kegiatan usaha masyarakat pedesaan, usaha pertanian, usaha dagang, dan jasa.

Secara parsial, variabel seperti penghasilan keluarga, pendidikan formal, frekuensi mengikuti pendidikan di lingkungan, mempunyai pengaruh yang kuat terhadap lamanya tunggakan kecuali jenis pekerjaan tidak memiliki hubungan nyata. Sedangkan partisipasi anggota yang meliputi; jumlah simpanan, jumlah pinjaman, frekuensi mengikuti pendidikan, lama tunggakan dan lamanya menjadi anggota,

mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pendapatan.

Amelia (2000) menjelaskan bahwa kinerja *credit union* mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi aktif dari anggota dalam pemberdayaan perempuan pedesaan melalui *credit union*. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa peran aktifitas *credit union* memberikan dampak terhadap pemberdayaan ekonomi anggota yang meliputi; kinerja usaha, akses pasar dan kemitraan anggota. Meskipun demikian, masih diperlukan kemitraan dengan lembaga lain, terutama dalam permasalahan pertanian.

#### **Faktor-Faktor Keberhasilan Koperasi**

Keberhasilan koperasi *credit union* ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Koperasi eksis jika terdapat kebutuhan kolektif untuk memperbaiki ekonomi secara umum.
2. Koperasi akan berkembang jika ada kebebasan dan otonomi dalam berorganisasi.
3. Keberadaan koperasi ditentukan oleh proses pengembangan pemahaman nilai-nilai koperasi.
4. Peran dan manfaat koperasi akan semakin dirasakan bagi anggota dan masyarakat jika terdapat kesadaran serta keanggotaan yang jelas.
5. Koperasi akan eksis jika mampu mengembangkan kegiatan usaha yang;
  - a. Luwes atau sesuai dengan kepentingan anggota.
  - b. Berorientasi pada pemberian pelayanan bagi anggota.
  - c. Berkembang sejalan dengan perkembangan usaha anggota.
  - d. Efisien, atau biaya transaksi antara koperasi dan anggota mampu ditekan lebih kecil dari biaya transaksi non-koperasi, dan
  - e. Mampu mengembangkan modal yang ada dalam kegiatan koperasi dan anggota sendiri.
6. Keberadaan koperasi akan sangat ditentukan oleh kesesuaian faktor-faktor tersebut dengan karakteristik masyarakat atau anggotanya (Krisnamurti, 1998).

Disadari sepenuhnya bahwa pemahaman nilai-nilai tersebut tidak dapat terjadi dalam *semalam*, tetapi melalui suatu proses pengembangan yang bertahap dan berkesinambungan, terutama dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi dengan tetap memberikan tempat bagi perkembangan aspirasi lokal yang spesifik menyangkut implementasi bahkan pengadaan (*enrichment*) dari nilai-nilai koperasi yang universal tersebut. Dengan demikian, proses pengembangan pemahaman nilai-nilai koperasi akan menjadi salah satu faktor penentu keberadaan koperasi (Mutis Thoby, 1992).

Kemudian, peran dan manfaat koperasi akan semakin dirasakan bagi anggota dan masyarakat jika terdapat kesadaran dan kejelasan dalam hal keanggotaan. Hal ini mengacu secara khusus pada pemahaman anggota dan masyarakat akan perbedaan hak dan kewajiban serta manfaat yang dapat diperoleh menjadi anggota atau tidak menjadi anggota. Jika terdapat keanggotaan yang jelas, maka manfaat yang diterima anggota tidak akan diterima oleh non-anggota. Pada gilirannya hal ini kemudian akan menumbuhkan kesadaran kolektif dan loyalitas anggota kepada organisasinya yang kemudian akan menjadi basis kekuatan koperasi itu sendiri (Hendrojogi, 1997).

Koperasi *credit union* memajukan peran sebagai pusat ekonomi terpadu masyarakat, karena berperan sebagai sumber keuangan bagi anggota yang sebagian besar melakukan peminjaman. Dalam hal ini, koperasi *credit union* berfungsi sebagai bank masyarakat dimana unit lain akan mendepositokan keuntungan dan modal mereka. Hal ini dilakukan untuk menghindari larinya modal dan mendukung sirkulasi ulang dana lokal.

### **Persepsi Responden Mengenai SHU**

Jaringan permodalan adalah suatu mekanisme untuk memperoleh dan berbagi modal diantara masyarakat itu sendiri. Modal dalam jaringan bertambah secara berkala melalui tabungan tunai yang dilakukan oleh anggota *credit union*. Pertumbuhan modal dapat juga berfungsi sebagai alat pembayaran bagi anggota yang hendak meminjam. Jaringan permodalan dapat menyatukan serta meningkatkan keuntungan dan memanfaatkan keuntungan ini dalam bentuk deviden atau sisa hasil usaha. Selain itu, responden juga menerima sisa hasil usaha (SHU) yang setiap tahun meningkat. Di

samping pelayanan simpanan dan pinjaman oleh koperasi kredit, jaringan permodalan akan bekerja untuk melakukan konsolidasi lebih lanjut terhadap modal lokal untuk memajukan masyarakat.

Lebih lanjut, 85% responden menyatakan bahwa mereka mengetahui pertumbuhan modal koperasi *credit union* setiap tahun. Hal ini dikarenakan oleh adanya pembagian buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) kepada setiap anggota koperasi *credit union* partisipasi. Kemudian, 85% responden juga menyadari bahwa semakin besar pinjaman kredit berarti usaha perputaran modal koperasi semakin tinggi, sehingga deviden yang diterima di akhir tahun semakin tinggi dan usaha koperasi semakin sukses.

Pernyataan responden mengenai dampak menabung dan meminjam terhadap meningkatnya SHU, 89,65% responden menyatakan “ya” dengan rata-rata 35,86 responden. 2,5% responden menyatakan “tidak” dengan rata-rata 1 orang responden, dan 7,85% responden menyatakan tidak tahu dengan rata-rata 3,14 responden. Berdasarkan hal itu, diasumsikan bahwa meskipun responden 89,65% telah mengetahui dampak menabung dan meminjam terhadap meningkatnya SHU, akan tetapi masih perlu dilakukan optimalisasi potensi pengetahuan kepada anggota yang menyatakan tidak dan ragu-ragu agar kontribusinya untuk kesejahteraan bersama lebih maksimal.

Secara konseptual pranata koperasi merupakan potensi modal sosial, karena ditemui beberapa elemen pokok dari modal sosial pada koperasi yaitu sikap saling percaya antara anggota koperasi dengan pengurus koperasi. Sikap saling percaya tersebut membentuk jaringan sosial dalam bentuk partisipasi anggota terhadap keberlangsungan koperasi yang diwujudkan dalam suatu wadah pranata koperasi. Ditemukannya elemen modal sosial dalam koperasi, meskipun unsur-unsurnya tidak bekerja dan berfungsi secara efektif menunjukkan bahwa koperasi merupakan salah satu potensi modal sosial yang hidup atau pernah ada dalam komunitas nelayan, khususnya pada komunitas nelayan di lokasi penelitian Sumatera Utara (Badaruddin, 2003).

Keberhasilan koperasi dalam menjalankan misinya sebagai mana dikemukakan Kusnadi (2000) menunjukkan bahwa bila elemen modal sosial yang menjadi dasar bagi hadir dan bekerjanya pranata koperasi berjalan dengan

efektif, maka koperasi akan berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya. Penelitian Mufti dalam tesis menyatakan bahwa variabel yang sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan koperasi unit desa adalah variabel partisipasi anggota dan variabel pelayanan koperasi kepada anggota.

### Partisipasi Responden

Partisipasi responden dapat diketahui dengan adanya kesadaran akan hak dan kewajiban anggota koperasi. Dalam hal ini, responden mengetahui dengan jelas adanya denda yang dikenakan apabila mereka tidak memenuhi kewajiban, seperti membayar simpanan wajib dan sukarela, bunga kredit pinjaman dan angsuran pinjaman dibayar setiap bulan. Selain itu, responden juga melakukan simpanan modal penyertaan kepada koperasi credit union ketika anggota membutuhkan pinjaman pada saat kas koperasi mengalami kekurangan modal. Lebih lanjut, koperasi mengajukan kepada anggota untuk memasukkan modal penyertaan untuk kontrak beberapa bulan, bila modal koperasi credit union sudah ada dikembalikan dana pinjaman tersebut dengan segera. Dalam hal ini, hanya 25% responden saja yang terlibat karena hanya ditawarkan pada anggota yang dianggap memiliki simpanan di rumah. Lebih lanjut, komposisi responden berdasarkan partisipasi dalam koperasi, ialah;

1. Responden yang menyatakan berpartisipasi berjumlah rata-rata 30,12 (75,3%).
2. Responden yang menyatakan tidak, berjumlah rata-rata 9 orang (22,5%).
3. Responden yang menyatakan tidak tahu 0,88 responden (2,2%).

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa walaupun partisipasi anggota sudah baik (75,3%) tetapi masih perlu dilakukan optimalisasi potensi partisipasi anggota karena masih ada anggota yang tidak mengetahui kegunaannya. Hal ini dilakukan agar anggota dapat menjalankan apa yang seharusnya dilakukan sehingga meningkatkan pemberdayaan mereka.

### Pendidikan Pengurus Koperasi

Dalam koperasi *credit union* Partisipasi Sukamakmur, pendidikan dilaksanakan oleh ketua beserta anggota-anggotanya. Waktu pendidikan disiapkan pada saat penabungan, baik bagi anggota lama maupun anggota yang baru

masuk dilakukan pendidikan secara rutin. Pertanyaan mengenai persepsi responden tentang pendidikan ditanggapi oleh 75% responden dengan menyatakan pernah mendapat pendidikan dari pengurus koperasi *credit union*. Lebih lanjut, kegiatan yang difasilitasi oleh koperasi *credit union* adalah memberikan pendidikan tentang koperasi *credit union* kepada anggota. Pendidikan tentang koperasi *credit union* ini terbukti membawa manfaat bagi anggota koperasi dalam hal mencermati posisi keuangan, mengenai resiko keuangan dan mempersiapkan keputusan yang berdasarkan pada kondisi keuangan yang aktual (Ningrum, 2005).

Hasil wawancara dengan informan menyebutkan bahwa anggota sering memotivasi orang lain agar masuk menjadi anggota koperasi. Dalam organisasi koperasi, yang lemah dikuatkan, yang bodoh diajari, yang mau berusaha didorong, dibimbing dan difasilitasi dalam berusaha untuk mendapatkan kredit empat kali saham simpanan yang tersedia.

Lebih lanjut, komposisi responden mengenai adanya pendidikan pengurus, antara lain;

1. Responden menyatakan “ada” berjumlah 30,71 orang (76,78%).
2. Responden menyatakan “tidak” berjumlah 7,86 orang (19,65%).
3. Responden menyatakan “tidak tahu” berjumlah 1,43 orang (3,57%).

Berdasarkan hal itu, dapat diasumsikan bahwa walaupun tanggapan responden tentang pendidikan sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu dilakukan optimalisasi potensi anggota dalam hal pendidikan. Hal ini dilakukan agar mereka tidak terhambat dalam pengembangan pemberdayaan hidup akibat keterbelakangan pendidikan.

### Kepemimpinan Pengurus Koperasi

Pertanyaan mengenai persepsi responden mengenai kepemimpinan koperasi ditanggapi oleh 92,5% responden dengan menyatakan bahwa kepemimpinan koperasi saat ini mempunyai kemampuan untuk berkembang. Pemahaman atas nilai-nilai koperasi keterbukaan, demokrasi, partisipasi, kemandirian, kerja sama, pendidikan dan kepedulian kepada masyarakat merupakan pilar utama kepemimpinan pengurus. Pengurus koperasi selalu bekerja sama, terbuka

dalam menghadapi masalah anggota-anggota koperasi *credit union*.

Pengurus koperasi *credit union* pada dasarnya merupakan cita-cita yang diwujudkan dalam bentuk prinsip-prinsip fundamental. Wujud praktisnya dalam struktur organisasi sangat ditentukan oleh karakteristik anggota-anggotanya yang kreatif dan mempunyai tanggung jawab saat penabungan, seperti penggunaan denda, dan sebagainya. Lebih lanjut, peminjam dikenakan denda bila tidak memenuhi membayar tepat waktu. Hal diatas tetap diberlakukan oleh kepemimpinan pengurus, agar anggota memahami hak dan tanggung jawab serta memenuhi kewajibannya.

Hal Ini akan menumbuhkan kesadaran kolektif dan loyalitas pengurus kepada organisasi yang kemudian akan menjadi basis kekuatan koperasi *credit union*. Dengan kata lain, kepribadian serta mental pengurus dan manejer sangat menentukan keberlangsungan hidup koperasi. Dengan demikian, pengurus harus juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya agar dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk jangka panjang. Tanggapan responden mengenai kepemimpinan pengurus dapat dilihat sebagai berikut;

1. Responden menyatakan “baik” berjumlah 34 orang (85%)
2. Responden menyatakan “tidak baik” berjumlah 4,09 responden (10,22%).
3. Responden menyatakan “tidak tahu” berjumlah 1,91 responden ( 4,78%).

Berdasarkan data yang diperoleh, diasumsikan bahwa walaupun kepemimpinan pengurus sudah cukup baik (85%), akan tetapi masih perlu dilakukan optimalisasi kepemimpinan pengurus untuk membina anggota *Credit Union*. Hal ini dimaksudkan agar kesejahteraan bersama melalui kontribusi bersama dapat tercapai lebih baik lagi, sehingga kemakmuran tercapai melalui keberhasilan anggota yang berdaya.

### Manajemen Koperasi

Berfikir secara administratif adalah berfikir secara penyelenggaraan segala sesuatunya guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Maksudnya adalah merencanakan jalannya usaha, mengembangkan organisasi usaha, menerima, menyaring, mendidik, menempatkan dan

memanfaatkan orang, menjalankan manajemen, menjalankan tata usaha, mengerahkan dana-dana serta kekuatan yang diperlukan mengendalikan aktivitas-aktivitas serta cara berfikir agar supaya semua aktivitas menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan (Atmosudirjo, 1982).

Responden yang mengalami pelakuan adil oleh pengurus sebanyak 27 orang (67,5%), hal ini berarti masih adanya anggota yang belum dilayani secara positif. Responden yang mengatakan administrasi keuangan didukung oleh administrasi yang baik sebanyak 29 orang (72,5%), berarti masih ada anggota yang merasa administrasi belum berjalan secara maksimal. Kemudian, Responden yang mengatakan bahwa Manajer menjalankan manajemen selalu memperhatikan fungsi *perencanaan* dan masalah-masalah strategis, berjumlah 32 orang (80%).

Responden yang mengatakan bahwa pengawas selalu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah internal koperasi, sebanyak 31 orang (77,5%). Responden yang mengatakan adanya kebebasan berpendapat, sebanyak 33 orang (82,5%). Responden yang mengatakan bahwa pengurus selalu membuat keputusan dan memperhatikan situasi kekuatan koperasi untuk jangka panjang, sebanyak 32 orang (80%). Dengan demikian, tanggapan responden mengenai manajemen administrasi *credit union* dapat diakumulasikan sebagai berikut;

1. Responden menyatakan “baik” berjumlah 30,91 orang (77,28%).
2. Responden menyatakan “tidak baik” berjumlah 6,91 orang (17,27%).
3. Responden menyatakan “tidak tahu” berjumlah 2,18 orang (5,45%).

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diasumsikan bahwa meskipun manajemen koperasi sudah dilakukan cukup baik (77,28%), tetapi masih diperlukan optimalisasi pengetahuan manajemen kepada anggota agar keberhasilan *credit union* memfokuskan diri pada pelayanan anggota semakin tinggi. Peningkatan pelayanan merupakan pembangkitan kekuatan anggota itu sendiri atau dalam terminologi Korten disebut *people centered development* yang mempengaruhi paradigma berfikir, metodologi dan pengorganisasian pencapaian tujuan.

### Pemberdayaan Masyarakat oleh Koperasi

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah kontrol pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan bahwa pembangunan masyarakat bersifat *people centered*, yaitu pemberdayaan individu yang sesuai dengan masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, persepsi responden tentang pemberdayaan masyarakat desa melalui koperasi kredit dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat dapat mengembangkan diri dan mencapai kemajuan melalui pembimbingan secara rutin.
2. Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat kegiatan keagamaan, bakti sosial, pertanian, untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.
3. Karakteristik pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan yang diarahkan kepada penggerak dan masyarakat secara simultan. Perpaduan ini menghasilkan kemampuan masyarakat yang mandiri sehingga mempunyai dampak peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat berorientasi kepada pembangunan masyarakat yang mandiri sehingga dan bercirikan "dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat".

Pemberdayaan masyarakat diimplementasikan dalam bentuk aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan mereka tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak *credit union* yang bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya melibatkan aksi sosial melainkan juga aksi penambahan kemampuan untuk berusaha dibidang pemberdayaan ekonomi semakin tinggi (80%). Misalnya: melalui pemberdayaan usaha ternak babi dan ayam, bagaimana pemasarannya, bagaimana cara memperoleh pakan yang baik dan murah.

Pengembangan masyarakat merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Selain itu, pengembangan masyarakat juga diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan bernuansa pemberdayaan yang memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan. Dengan demikian pengembangan masyarakat dapat

didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya.

Strategi perencanaan pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui 7 langkah perencanaan, yakni; (1) Perumusan masalah, (2) Penetapan program, (3) Perumusan tujuan, (4) Penetapan kelompok sasaran, (5) Identifikasi sumber dan tenaga pelaksana, (6) Penentuan strategi dan jadwal kegiatan, (7) Monitoring dan evaluasi.

Hasil wawancara dengan informan menyebutkan bahwa pengembangan masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam enam model sesuai dengan gugus profesional dan radikal yaitu:

1. Perawatan masyarakat merupakan kegiatan sukarela yang biasanya dilakukan oleh warga kelas menengah yang tidak dibayar. Misalnya: adanya ceramah-ceramah yang dilakukan oleh pihak LSM, Perguruan Tinggi dan sebagainya.
2. Pengorganisasian masyarakat memiliki fokus pada perbaikan koordinasi antar berbagai lembaga kesejahteraan sosial. Misalnya: saling menghormati antarumat beragama di koperasi *Credit Union* bila ada pelatihan atau kegiatan masing-masing.
3. Pembangunan masyarakat memiliki perhatian pada peningkatan ketrampilan kemandirian dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. *Credit union* membimbing masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah. Misalnya: cara membuat kompos didatangkan pihak pertanian yang melakukan pelatihan cara membuat kompos.
4. Aksi *credit union* berdasarkan kelompok bertujuan untuk membangkitkan kelompok-kelompok lemah secara bersama-sama meningkatkan kemampuan melalui strategi atau tindakan langsung. Misalnya cara menanggulangi penyakit babi dan ayam.
5. Aksi masyarakat berdasarkan jender bertujuan untuk mengubah relasi sosial kapitalis-patriakal antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan negara, serta orang dewasa dan anak-anak.
6. Aksi kelompok masyarakat *credit union* berdasarkan kemampuan bersama merupakan usaha untuk memperjuangkan kesamaan kesempatan dan menghilangkan diskriminasi sosial (95%).

Dalam menyoroti pemberdayaan yang berkembang dan terwujud pada anggota koperasi *credit union* seperti peternakan, dan pertanian merupakan pembangunan ekonomi. Mengakui pentingnya pengetahuan tentang pemberdayaan sama pentingnya dengan mengakui pengetahuan tentang pranata dan kebudayaan masyarakat dalam perkembangan ekonomi. Dasar filasafat pemberdayaan untuk membantu seseorang atau sekelompok agar maju, jangan diberikan ikan tapi berilah kail “*lebih baik menjadi bos kecil daripada menjadi pegawai atau kuli dengan gaji besar*” (Atmosudirjo 1982:102).

Tanggapan responden mengenai tingkat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh koperasi *credit union*, antara lain:

1. Responden menyatakan “tinggi” berjumlah 36,62 orang (91,55%).
2. Responden menyatakan “rendah” berjumlah 2,63 orang (6,58%).
3. Responden menyatakan “tidak tahu” berjumlah 0,75 orang (1,87%).

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa walaupun pemberdayaan masyarakat dalam pembinaan menuju mandiri yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup sudah cukup tinggi (91,55%). Akan tetapi perlu optimalisasi agar semua anggota dapat meningkatkan pendapatan ekonominya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Koperasi *credit union* perlu menonjolkan azas kekeluargaan dengan kerja sama, dibandingkan persaingan sempurna. Koperasi akan berhasil jika manajemen bersifat terbuka dan partisipatif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi *credit union* Partisipasi Sukamakmur, yang meliputi; SHU, partisipasi anggota, kepemimpinan pengurus, manajemen koperasi, dan pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sudah cukup tinggi. Akan tetapi, optimalisasi masih perlu dilakukan sehingga tujuan dari koperasi *credit union* Partisipasi Sukamakmur dapat dicapai dengan lebih maksimal.
3. Pemberdayaan masyarakat berorientasi kepada masyarakat yang mandiri (melalui kegiatan peternakan) yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan kemudian melakukan kegiatan kebutuhan bersama.
4. Tidak terdapat hubungan nyata antara karakteristik responden pendidikan formal, umur, pendidikan koperasi, motivasi menjadi anggota, simpanan dan pinjaman dengan keberhasilan Koperasi *credit union* dan KUD (produktifitas dan kepuasan anggota).
5. Partisipasi anggota yang meliputi; jumlah simpanan, jumlah pinjaman, frekuensi mengikuti pendidikan, lama tunggakan dan lamanya menjadi anggota, mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pendapatan.
6. Terdapat hubungan antara pendidikan formal dan non formal (pendidikan koperasi dan kewirausahaan) dengan keberhasilan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, 2001. *Peranan Aktivitas Credit Union Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Tesis (S-2) Tidak Diterbitkan. Medan. Program Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP-USU).
- Atmosudirjo, Prajudi. 1982. *Dasar-dasar Administrasi Niaga*. Jakarta: Chalia Indonesia.
- Badaruddin & Nasution, M. Arief. 2005. *Modal sosial dan Pemberdayaan Komunitas Nelayan (Isu-isu Kelautan dan Kemiskinan Hingga Bajak Laut)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hendrojogi, 1997. *Azas-azas Koperasi; Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1995. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Krisnamurti, Bayu. 1998. *Perkembangan Kelembagaan dan Perilaku Usaha Koperasi Unit Desa di Jawa Barat*. Kajian Cross Section (Tidak Diterbitkan). Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Manurung, M. 1998. *Indonesia Menuju Demokrasi Ekonomi; Kumpulan Makalah Sistem Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Marbun, Dunan. 1999. *Peranan Credit Union dalam Mengelola Simpan-pinjam Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Wilayah Pedesaan*. Tesis (S-2) Tidak Diterbitkan. Medan. Program Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP-USU).
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Mubyarto. 1999. *Reformasi sistem Ekonomi, dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mutis, Thoby. 1983. *Organizational Competency and Effectiveness of The Jakarta Credit Cooperation/Credit Union (CU)*. Philippines: South East Asia Interdisciplinary Development Institute.
- Mutis, Thoby. 1992. *Pengembangan Koperasi; Kumpulan Karangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ngo, A. Petrus. 2002. *Ketua Credit Union Daya Lestari samarinda, Mengapa harus Credit Union?*, Makalah disampaikan pada Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat tanggal 2 Juli, Jakarta.
- Ningrum, Natasia S. 2005. *Larangan Praktik Monopoli dan Perjuangan Tidak sehat*. Wawasan.
- Sukardi, 2003. *Sritua Arif: Ekonomi Rakyat di Era Globalisasi*. Makalah disampaikan Pada Seminar Sehari Memperingati 100 hari Meninggalnya Prof. Dr. Sritua Arif. Medan, FISIP USU.
- Sukamdiyo. 1996. *Manajemen Koperasi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Titus, K. Kurniadi. 2004. *Ekonomi Rakyat*. Makalah Pendahuluan Pada Seminar Ekonomi Rakyat tanggal 4 Juni 2004, Lembaga Keuangan Mikro.
- Widiyanti, Ninik. 2002. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

## **GENERASI KEDUA PETANI P.I.R.: PERLU DIFIKIRKAN ATAU BIARKAN MEREKA MISKIN KEMBALI?**

**Rizabuana Ismail**

**Abstract:** The development of Nucleus Inti Estate Small Holder (NES = PIR) in Indonesia has entered to the new era with a promising achievement. The farmers, as the first generation of PIR has achieved the development objectives, initiated in 1980s. This articles tries to socially compare eith the plantation which has been developed by FELDA in Malaysia, where currently the farmers are in their third generations. PIR farmers will face various challenges which should be handled in a proper manner so that they can work down further to third generation or even more.

**Keywords:** nucleus Inti Estate Small Holder (NES = PIR), plantation, farmers

### **PENGENALAN**

Pembangunan perkebunan dengan pola PIR yang diperkenalkan di Indonesia pada decade 1980-an, bertujuan untuk memanfaatkan tanah-tanah terlantar, meningkatkan pendapatan dan kehidupan petani, meningkatkan cadangan devisa Negara dan berbagai tujuan mulia lainnya. Ternyata, sampai tahun 2007-an ini telah berhasil membangun lebih dari 250.000 Ha lahan kebun milik petani plasma dengan berbagai tanaman komoditas seperti kelapa sawit, karet, kokoa, dan teh.

Keberhasilan lainnya adalah telah menjadikan lebih dari 125.000 keluarga petani plasma tangguh yang masing-masing memiliki 2 hektar lahan tanaman pokok, 0,75 hektar lahan pekarangan dan 0,25 hektar lahan perumahan. Mereka telah berpendapatan rata-rata lebih dari Rp. 4 – 5 juta per bulan untuk tanaman sawit, telah melunasi cicilan kredit yang diberikan Bank Dunia, ADB ataupun pemerintah RI serta telah menerima berbagai fasilitas permukiman yang lebih baik. Namun demikian, apakah usaha-usaha kerja keras yang penuh pengorbanan dan biaya ini yang telah dilakukan PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) sebagai pelaksana di lapangan, akankah mencapai sasarannya setelah semua pengelolaan kehidupan diserahkan sepenuhnya kepada petani sendiri ataupun selanjutnya kepada anak-anak mereka sebagai generasi kedua petani PIR? Persoalan ini perlu dipikirkan kembali, baik oleh Departemen BUMN, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintahan Provinsi, ataupun PTPN sendiri.

### **Belajar dari FELDA di Malaysia**

Jalan panjang dalam mengelola petani dan membangun kawasan pertanian seperti itu telah dilakukan oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau Felda (Federal Land Development Authority) Malaysia sejak tahun 1956. Lembaga ini dalam operasinya telah berhasil mendirikan 422 kawasan permukiman yang meliputi pembangunan kebun kecil untuk petani seluas 714.945 hektar, yang dimiliki lebih dari 100.000 keluarga petani. Sehingga kini Badan Usaha Milik Pemerintah ini telah memiliki 13 unit usaha sendiri (anak perusahaan) yang berorientasi keuntungan dan tersebar di seluruh negeri Semenanjung Malaysia. Unit usaha yang dimiliki seperti: Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit (PKS), Pabrik Pengelolaan Kernel, Perusahaan Transportasi Pengangkutan TBS, Perusahaan Penjaga Keamanan, Perusahaan Pemasaran CPO sendiri, lembaga pendidikan dan sebagainya.

Melihat jalan panjang yang telah mereka lalui sudah selayaknya pemerintah RI melakukan reorganisasi pengelolaan PIR plasma, hanya dikelola di bawah satu tangan sebagai badan yang independent, layaknya Felda tersebut. Sehingga keuntungan yang diperoleh tidak tercecer ke berbagai kepentingan, untuk membiayai kunjungan orang-orang dari berbagai instansi, dengan alasan, pemeriksaan berupa sumbangan, bantuan dan koordinasi. Pernah seorang staf di PTPN VI Jambi menghitung ada 23 jumlah instansi pemerintah yang ikut mengurus petani di PIR, mulai dari Departemen Transmigrasi, BKKBN, Departemen Agama sampai Dinas Peternakan. Bayangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai kedatangan mereka. Padahal biaya ini dapat dipakai membiayai perbaikan jalan seperti di Felda yang

umumnya sudah beraspal, sehingga tidak ada lagi buah kelapa sawit menjadi restan dan membusuk, karena kesulitan mengeluarkan produksi dari kebun apabila musim hujan telah tiba, telah ada listrik di setiap permukiman bahkan telepon dan internet telah masuk ke rumah-rumah petani.

### **Generasi Kedua Felda**

Berbeda dengan orang tua mereka yang ikut langsung bertungkus lumus membangun kebunnya dari awal – mulai dari membuka kawasan hutan sehingga menanam dan memelihara tanaman di lahan plasmanya-, anak-anak pada generasi kedua petani ini tinggal menikmati hasil jerih payah orang tuanya saja. Mereka tinggal melakukan pemeliharaan dan mengutip hasil panen tanaman komoditasnya. Tidak lagi membayar cicilan hutang dan telah menikmati berat tandan buah segar (TBS) yang sudah mencapai maksimum. Namun demikian, apakah gambaran dari luar ini dapat tercapai dengan seketika tanpa suatu kebijakan? Kajian secara Sosiologis pernah dilakukan seorang pelajar di Universiti Malaya, Malaysia yang menunjukkan bahwa anak-anak pemilik lahan, yang berada pada usia kerja 15-29 tahun sebanyak 72,2% kembali menjadi tenaga buruh di Felda tersebut, baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuannya. Bagi yang melakukan migrasi keluar dari kawasan permukimannya, mereka bekerja di sektor perindustrian dan buruh (21,9%), ketentaraan (9,6%), pembantu toko (6,1%), kerani (4,4%), guru (4,4%), pegawai rendah (4,4%), pegawai tinggi (2,6%) peneroka muda (7,9%) dan pekerjaan lainnya seperti: pembantu di klinik, supir, mekanik, tukang masak, tukang jahit, tukang kebun, kondektur bus, dan sebagainya sebanyak (17,5%). Arah migrasi yang mereka lakukan sebanyak 58,3% ke kawasan perkotaan dan 41,7% masih di sekitar kawasan pedesaan. Sedangkan pengangguran tamatan Sekolah Dasar hanya 1%, pengangguran tamat SMP 19,2%, Tamat SMA (30,7%) dan belum ada tamatan universitas yang menganggur.

Walaupun data statistik ini hanya gambaran di suatu permukiman, namun pihak Felda telah melakukan kebijakan seperti: (a). mewujudkan generasi kedua yang berpelajaran, bertanggung-jawab, sadar dan insyaf tentang peranan mereka untuk kemajuan program pembangunan ini. (b). memberi dan menyokong usaha pelajaran dan pendidikan. (c).

memperkemaskan sistem hidup dan bekerja secara berkelompok dan terorganisir. (d). memberi dan menyelaraskan latihan-latihan kemahiran di Felda. (e). memberi peluang pekerjaan yang sesuai dan sejajar dengan kemampuan dan kesanggupan anak tersebut. (f). menyediakan kesempatan berniaga dan mandiri, melalui projek-proyek perniagaan dan perusahaan swasta serta memberi bantuan dan sokongan dana yang diperlukan. (g). memberi bantuan konsultasi dan bimbingan karier.

Untuk mengimplementasikan kebijakan ini, telah didirikan sekolah hampir di setiap kawasan permukiman, mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai sekolah menengah. Pada tahun 1985 saja telah didirikan 217 Taman kanak-kanak dengan jumlah murid yang telah mengikuti sebanyak 18.358 orang, dengan biaya sebesar RM.1,7 juta. Selain itu mereka juga telah mendirikan biro pendidikan Felda di setiap kawasan permukiman bekerjasama dengan Persatuan Orangtua Murid (POM). Sedangkan di tingkat Pusat (seperti: Kantor Direksi di PTPN) mereka membentuk Bagian Pendidikan dan Pengabdian Sosial Felda. Tugasnya adalah membantu keuangan bagi pendidikan anak-anak petani plasma yang berprestasi namun menghadapi kesulitan keuangan, bimbingan belajar bagi anak-anak yang akan masuk ke tingkat SMA dan universitas, menyediakan asrama Felda bagi yang tinggal di kota-kota yang ada universitasnya. Bukan hanya dalam hal keuangan saja, tetapi juga menyediakan kursus-kursus ketrampilan secara gratis bagi anak SMP yang putus sekolah seperti kursus mekanik (selama 20 bulan), kursus mengemudi traktor (selama 3 bulan), pertukangan kayu (selama 12 bulan), memperbaiki elektronik Televisi (selama 18 bulan), bengkel sepeda motor (selama 12 bulan), dll. Latihan dilakukan bekerjasama dengan pusat latihan tenaga kerja di berbagai daerah, dengan mengirimkan mereka yang berminat ke tempat-tempat pelatihan tersebut, dengan jangka waktu 3 kali setahun. Hasil kebijakan yang diambil ini, tentunya membuat kita yang berkecimpung di dunia pendidikan amat mencengangkan. Hal yang sudah biasa dijumpai pada anak-anak petani di permukiman ini adalah banyak dari mereka yang telah menamatkan sarjana lulusan dalam negeri maupun lulusan luar negeri seperti dari Amerika Serikat ataupun United Kingdom, memiliki gelar

Master ataupun Doktor dalam berbagai bidang ilmu tamatan luar negeri.

Melihat apa yang dilakukan oleh Felda ini, apakah juga mungkin untuk dilakukan terhadap anak-anak petani plasma di Indonesia? Kenapa tidak mungkin, toh kelapa sawit yang tumbuh di bumi Indonesia adalah jenis yang sama dengan kelapa sawit yang tumbuh di Malaysia. Jumlah produksi per pokok dan harga per kilogram juga adalah sama. Namun, kenapa kita tidak dapat berbuat yang sama dengan mereka? rasanya, pemerintah kita mampu untuk melaksanakan dan mengambil perhatian terhadap pendidikan anak-anak petani plasma ini. Persoalannya kembali kepada keinginan “keinginan politis” dari pemerintah dan menjadikan PIR sebagai suatu badan usaha yang independen.

### **Masalah dan Tantangan P.I.R. pada Generasi Kedua**

Persoalan yang akan dihadapi PIR di Indonesia, tentunya telah dihadapi oleh Felda di Malaysia. Walaupun dengan beberapa variasi, harus ada yang patut untuk dipikirkan menjelang replanting (penanaman semula) tanaman sawit di beberapa daerah, seperti di kawasan Sei Bahar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Kumpulan persoalan-persoalan ini merupakan hasil observasi, kajian literatur dan pengalaman bekerja dengan petani plasma di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Persoalan-persoalan yang akan muncul pada generasi kedua petani plasma, antara lain:

#### **1. Persoalan Tanah Warisan**

Penentuan kepada siapa tanah ini akan diwariskan, merupakan persoalan yang sangat rumit. Selain akan banyaknya terjadi keretakan dan perselisihan keluarga, dikhawatirkan juga banyaknya lahan plasma yang tidak terurus dan menjadi semak belukar kembali. Seandainya dilakukan pembagian warisan, selain menyalahi perjanjian (contract farming) juga tidak ekonomis lagi. Dengan andaian setiap keluarga petani terdiri dari 2 orang anak dan 1 orang istri, dimana setiap keluarga memiliki 2 Ha setelah pembagian warisan, tentunya setiap orang hanya akan memiliki 0,6 Ha. Keluasan yang demikian bukanlah ukuran yang ekonomis untuk

dikerjakan secara komersil. Ini didasarkan pada hukum ‘the law of diminishing returns’, bahwa setiap luas tanah yang sedang dikerjakan mempunyai keterbatasan untuk bertambah. Berarti, keluasannya akan semakin berkurang. Ini akan menyebabkan jumlah outputnya pun akan berkurang walaupun berapa banyak input yang dibawa masuk seperti: pupuk, bibit, tenaga kerja, teknologi. Apalagi harga-harga yang berfluktuasi, menyebabkan akan terjadinya pengulangan kemiskinan. Untuk itu, sejak dini harus ditentukan siapa sebagai pewaris dan bagaimana syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang generasi kedua petani plasma. Sudah selayaknya, Tim TP3D I dari setiap pemerintahan provinsi mengambil inisiatif menentukan ahli waris terhadap lahan kebun plasma. Walau bagaimanapun juga, hak pewarisan tanah akan diberikan kepada salah seorang anak apabila isteri petani plasma itu telah meninggal dunia.

#### **2. Rumah Tempat Kediaman**

Bentuk permukiman yang telah didesain dengan baik, perencanaan lokasi perumahan yang teratur dan sistematis hampir dijumpai pada setiap permukiman petani plasma. Perubahan sudah banyak terlihat dari bentuk rumah, dari rumah petak berdinding kayu telah berubah menjadi rumah joglo dengan luas dan bentuk yang bervariasi. Namun, belum dijumpai petani yang membangun rumah lain di dekat rumah yang ada. Permasalahan akan muncul, seandainya anak-anak petani ini akan berkeluarga dan membutuhkan perumahan, bagaimana mengatasinya? Untuk itu perlu dipikirkan jalan keluarnya. Kalau diizinkan mendirikan di sembarang tempat, apakah sesuai dengan tujuan semula, menjadikan suatu permukiman yang rapi, teratur dan nyaman.

#### **3. Generasi Kedua yang Tidak Terpilih atau Tidak Memilih sebagai Pewaris Tanah**

Kelompok generasi kedua yang tidak terpilih atau tidak memilih sebagai pewaris tanah setelah menikah akan terpaksa keluar dari lokasi PIR. Ini disebabkan tanah-tanah dalam proyek PIR tidak boleh dipecah-pecah hak miliknya dan dibagikan kepada para ahli waris dari petani yang bersangkutan. Bukan saja tidak ekonomis tetapi juga menimbulkan masalah menempatkan lokasi

rumah pewaris generasi baru ini. Untuk itu, setiap lahan kebun petani plasma mestilah kekal atas nama seorang pemilik buat selama-lamanya. Petani plasma yang telah tua perlu menentukan seorang pewaris, yang telah difikirkan benar-benar berminat untuk meneruskan hidup sebagai aktivitas pertanian yang serius.

#### **4. Biaya Menanam Kembali (*Replanting*)**

Persoalan biaya menanam kembali telah menjadi beban pikiran bagi petani plasma saat ini. Program asuransi Idapertabun yang telah diperkenalkan oleh asuransi Bumiputera dan Dirjenbun sebagai tabungan untuk menanam kembali, nampaknya tidak membawa hasil yang diharapkan. Jika penanganannya diserahkan kepada pasar, maka banyaklah lahan petani akan dijual di bawah tangan kepada pemilik uang yang bukan petani. Dan petani akan terpinggirkan. Sedangkan, apabila menggunakan kredit Bank dengan bunga komersil, jelaslah petani akan menjadi sapi perahan semata. Sudah selayaknya Menteri Keuangan RI mencontohi Anggaran Belanja 2001 Kerajaan Malaysia yang diajukan menteri keuangannya, untuk memasukkan biaya menanam kembali lahan kebun milik petani kecil ke dalam anggaran belanja negara dan memberikan insentif keuangan yang sangat membantu rakyat kecil.

#### **5. Sistem Pengurusan Lahan Kebun dan Organisasi Masyarakat P.I.R., Mesti Tetap Dipertahankan Secara Kolektif Seperti Sekarang Ini**

Mempertahankan bentuk organisasi yang sudah ada, seperti ketika awal pembentukan kebun plasma adalah sangat tepat. Bentuk pengurusan lahan dengan cara 'block system' telah dilakukan di berbagai negara dan menunjukkan hasil yang memuaskan. Pada masa kini, kecenderungan untuk mengganti dan menganggap sistem yang telah ada harus ditukar kepada hal yang baru, selalu menjadi suatu keinginan. Padahal, kelemahan yang timbul dalam organisasi yang telah ada tersebut, bukanlah disebabkan struktur atau sistem kerja organisasi. Ketidakefisien dan ketidakefektifan dari organisasi ini selalunya disebabkan faktor kesalahan manusia. Untuk itu, pemberdayaan petani plasma dan pemahaman mereka terhadap organisasinya haruslah selalu ditingkatkan.

#### **6. Menyewakan Tanah Kepada Pihak Lain**

Persoalan ini timbul, apabila harga komoditas ini di pasaran terus menurun ataupun karena keluarga petani plasma tidak aktif dalam mengurus lahannya. Dengan menyewakan tanahnya, petani memperoleh uang secara cepat, tidak mengeluarkan uang untuk perawatan kebun dan dapat bekerja sambilan di tempat lain. Selalunya penyewaan dilakukan kepada tengkulak dan penggunaan uang hasil penyewaan untuk hal-hal yang tidak produktif. Oleh tengkulak, pokok kelapa sawit tersebut akan 'dipaksa' untuk mengeluarkan buah tanpa mengikuti metode pemeliharaan yang benar, seperti: menyiram buahnya dengan garam, pemupukan satu jenis hanya untuk memaksa buah cepat matang, dsb. Setelah masa penyewaan, pada akhirnya tanaman menjadi rusak dan petani akan kembali bekerja sebagai buruh di ladangnya sendiri. Belajar dari pengalaman di Malaysia, pemerintah provinsi telah mendirikan perusahaan yang akan bertindak sebagai penyewa tanah-tanah petani yang memang sangat berkeinginan menyewakannya. Dalam hal ini, perusahaan tidak semata-mata berfungsi mencari keuntungan tetapi juga membantu petani secara sosial. Sehingga petani peminjam tersebut tidak dirugikan dari aspek materi ketika melakukan penyewaan dan tidak dirugikan terhadap kualitas tanamannya setelah berakhirnya masa penyewaan.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Persoalan yang ditunjukkan oleh generasi kedua Felda di Malaysia saat ini, cepat atau lambat akan dialami oleh petani plasma di Indonesia. Penelitian dan kajian yang seksama harus dilakukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang sistem ekonomi petani plasma dan situasi masyarakat setempat.

Bagaimanapun juga, usaha-usaha untuk mengetahui sistem ekonomi petani plasma ini haruslah berupaya mengaitkan proses produksi tanaman komoditasnya dengan proses-proses masyarakat yang lebih luas. Hanya dengan cara ini penghayatan terhadap kehidupan petani plasma untuk masa yang akan datang menjadi lebih berarti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Silong (2006). *Visions of FELDA's Generation X And The Bordorless Felda*, Kuala Lumpur: Felda International Convention (Paper Unpublished). Kuala Lumpur: FELDA
- Lim Teck Ghee and Richard Dorall, 1992. *Contract Farming In Malaysia With Special Reference to Felda Land Scheme*, dalam David Glover & Lim Teck Ghee (ed.), *Contract Farming in Southeast Asia, Three country studies*, Institute For Advanced Studies University of Malaya, Kuala Lumpur.
- Noor, P. 1998. *Perubahan Sosio Budaya Masyarakat Felda, Kajian Kes Felda Melati Jengka Sebelas, Bandar Jengka Pahang*, Universiti Malaya, tidak diterbitkan.
- Rizabuana Ismail, 1991. *Ketaksamaan sambutan terhadap Program Pembangunan PIR: Suatu Analisis Ekonomi Moral Orang Dayak Pasir dan Ekonomi Rasional Warga Transmigran di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia*, Universiti Kebangsaan Malaysia, tidak diterbitkan.
- Shamsul Amri Baharuddin (2001). *Felda Lama dan Felda Baru*, dalam *Majalah Dewan Budaya*, Kuala Lumpur, jilid 23; 5: 10-11.
- Tunku Shamsul Bahrin & Perera, PDA (1977). *Felda 21 Years of Land Development*. Kuala Lumpur: FELDA
- Tunku Shamsul Bahrin & Thong, LB (1988). *FELDA: 3 Decades of Evolution*. Kuala Lumpur: University of Malaya

# KAJIAN SOSIO KULTURAL, POLITIS, DAN EKONOMI MASYARAKAT PEMILIH DALAM PILKADA

Robert Siregar

**Abstract:** Natural process which expected in the nature of democracy will produce a leader that able to organize and make safe the society, so The Law No. 32/2004 expected will find a leader that able to develop region. Democracy era could influence the change of global scale on a system that have formed, then, geo-socio-cultural and geo spatial factor could influence the process in Indonesia, especially the authority problems election, of course that change aim is to get the perfecting.

**Keywords:** socio-cultural, democracy

## PENGENALAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

## PEMBAHASAN

### Wujud Demokrasi dalam Otonomi

Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti, maka dilakukan perubahan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menyikapi perkembangan yang ada pada daerah Kabupaten/Kota yaitu tentang akan berakhirnya periode Kepala Daerah diperlukan suatu pemahaman yang menyeluruh dari kita tentang apa yang seharusnya dapat kita perbuat. Maka untuk menanggapi proses pencalonan Kepala Daerah yang akan dilakukan

secara langsung oleh masyarakat dengan mekanisme yang mengacu pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, kita merasa berkewajiban untuk ikut mensukseskan tahapan proses penjurangan Kepala Daerah pada Kabupaten/Kota.

Seperti apa yang tercantum jelas pada UU.No.32 Tahun 2004 pada Pasal 56 ayat (1) yang mengatakan “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Menyikapi sistem perundang-undangan yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung, maka perlu dilihat bagaimana kondisi daerah dan masyarakatnya dari sosio-kultural, politis dan ekonominya sebagai bagian yang diperlukan dalam strategi pelaksanaan PILKADA tersebut. Dimana hal perlu dilakukan pengkajian bagi **”siapa” yang akan ikut serta dalam perebutan pemenang** nantinya dalam PILKADA.

### **Sosio Kultural, Politik, dan Ekonomi**

Dalam melakukan operasional PILKADA pada dasarnya perlu dilakukan suatu kajian tentang sosio-kultural, politis dan ekonomi yang ada pada tengah-tengah masyarakat, untuk itu dilakukan dengan mengidentifikasikan nilai-nilai strategis yang dimiliki masyarakat. Dimana sistem nilai adalah suatu sistem nilai budaya yang terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia.

Sistem-sistem tata kelakuan manusia lain yang tingkatnya lebih konkrit seperti aturan-aturan khusus, hukum norma-norma yang semuanya berpedoman pada sistem nilai yang merupakan ciri khas bagi suatu masyarakat. Nilai-nilai yang ingin dicapai itu haruslah sesuai dengan permintaan masyarakat yang dilayani. Jadi tidak tepat misalnya bila kita membuat sasaran menghapuskan buta aksara atau kalau semua orang sudah dapat membaca sebab hal itu tidak lagi dibutuhkan masyarakat.

Maka dalam pemilihan kepala Daerah Kabupaten/Kota, didalam membuat strategi analisis dalam mendalami keinginan daerah yang tentunya akan dilakukan kajian oleh figur

pemimpin yang ingin peduli terhadap suatu daerah tersebut “apa”, “bagaimana” kebutuhan masyarakat, harus didasari oleh nilai-nilai strategis yang ada di Daerah Kabupaten/Kota dan asli merupakan nilai yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Adapun nilai-nilai strategis yang tetap hidup ditengah-tengah kehidupan masyarakat Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

#### **a. Nilai Moral**

Nilai moral mencakup pengidentifikasian perilaku dari masyarakat yang akan dijadikan sebuah acuan seorang pemimpin dalam menentukan kebutuhan manajemen pembangunan daerah. Nilai ini akan menjadi sumber inspirasi dan sumber motivasi serta merupakan penuntun dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Daerah Kabupaten/Kota.

#### **b. Nilai Adat-Istiadat dan Institusi**

Nilai adat istiadat ini dapat juga disebut dengan adat tata kelakuan, atau secara singkat adat dalam arti khusus, atau adat istiadat dalam bentuk jamaknya. Adat tata kelakuan yang dimaksud di sini adalah menunjukkan bahwa kebudayaan ideal itu biasanya juga berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat.

Sebelum institusi/lembaga dibentuk, Daerah Kabupaten/Kota telah memiliki nilai-nilai institusi yang dapat kita lihat sehari-hari yaitu adanya ikatan kekerabatan adat pada suatu daerah yang dibentuk atau kumpulan tokoh-tokoh masyarakat Daerah Kabupaten/ Kota yang telah lama dikenal, dan selain itu masyarakat daerah telah lama mengenal arisan dan serikat tolong-menolong. Dan salah satunya yang sejak dulu telah lama berakar di Daerah Kabupaten/Kota misalnya, pada adat batak toba: *dalihan natolu*, Simalungun *tolu sahundulan*, lima saodoran yang merupakan sistem kekerabatan di kalangan masyarakat adat daerah.

#### **c. Nilai Historis dan Geografis**

Sejarah Daerah dimulai sekitar tahun 500 Masehi yaitu berdirinya kerajaan kedaerahan. Pada saat ini wilayah kerajaan kedaerahan tersebut harus dapat dipelajari sesuai dengan meliputi seluruh sumatera bagian utara dimana terbentang luas, dan kondisi geografis daerah

misalnya; pada pantai barat Sumatera sampai ke Selat Malaka di sebelah Timur dan di sebelah Utara disebut *Jayu* atau yang sekarang Aceh sampai ke Toba Selatan.

Pada masa kerajaan daerah dikenal strategi yang diterapkan yaitu sektor pertanian dan perkebunan serta perdagangan sudah dikenal oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari lapisan tanah yang dimiliki Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa struktur tanah dan unsur hara tanah, cocok untuk tanaman kultur seperti teh, karet, kelapa sawit. Dan dapat diyakini bahwa kebudayaan ini sampai sekarang tetap membudaya di Daerah Kabupaten/Kota dan disimpulkan sebagai suatu strategi yang dapat dilakukan dalam memahami kondisi suatu daerah.

#### **d. Nilai Religius**

Nilai religius ini sifatnya sudah permanen di Daerah Kabupaten/Kota sama halnya dengan daerah lain bahkan Indonesia sendiri selaku negara beragama, dimana setiap pekerjaan atau aktivitas tersebut selalu dihubungkan dengan kekuasaan sang pencipta Allah yang maha kuasa. Hal ini dapat dilihat dari agama yang dianut oleh masyarakat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan agama lainnya.

#### **e. Nilai Mandiri (Kreatif dan Inovatif)**

Mandiri dalam arti mengurangi ketergantungan kepada orang lain. Nilai mandiri yang telah dimiliki masyarakat daerah berarti bahwa masyarakat daerah sejak dulunya sudah memiliki etos kerja yang tinggi dalam melakukan kegiatan. Hal ini terbukti dari Surplusnya Daerah Kabupaten/Kota dalam pertanian seperti beras, perkebunan, yang bahkan telah mampu menyuplai ke daerah lain. Selanjutnya, kemandirian ini juga akan terwujud dalam perumusan kebijaksanaan.

#### **f. Nilai Sejahtera**

Nilai sejahtera yang dimaksud di sini sudah mencakup beberapa segi kehidupan yang saat ini apabila dilihat keadaannya dalam masyarakat semakin berkembang.

*Pertama*, kemauan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan sudah sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari penduduk Daerah Kabupaten/Kota yang telah banyak menyelesaikan pendidikannya di berbagai

perguruan tinggi di Indonesia bahkan hingga ke luar negeri.

*Kedua*, masalah kesehatan juga sama halnya dengan pendidikan, dimana Daerah Kabupaten/Kota sudah mempunyai rumah sakit yang telah diakui di Daerah Kabupaten/Kota sendiri maupun diluar Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini membuktikan bahwa Daerah Kabupaten/Kota sudah mampu menanggulangi kesehatan sendiri bahkan di luar Daerah.

*Ketiga*, adalah masalah pemenuhan kebutuhan pokok. Sebenarnya Daerah Kabupaten/Kota sudah lama menjadi daerah yang swasembada pangan. Ini merupakan bukti bahwa Daerah Kabupaten/Kota tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya bahkan sampai mengeksport ke daerah lain di luar Daerah Kabupaten/Kota tersebut.

Dengan memahami nilai-nilai tersebut di atas diharapkan adanya seseorang yang peduli untuk membenahi suatu daerah akan dapat melakukan kajian atas sosio-kultural, politis, dan ekonominya. Dimana di antara nilai-nilai tersebut dapat dilihat bagaimana sosio-kultural yaitu pada nilai moral, nilai adat-istiadat dan nilai religiusnya. Sebab dengan memahami nilai-nilai tersebut akan diketahui "apa" dan bagaimana keinginan, kebutuhan dan kondisi daerah untuk dapat dilakukan beberapa strategi yang dapat dikehendaki oleh masyarakatnya.

Sedangkan untuk kajian politik akan dapat dilihat dari nilai religius, nilai histories, nilai geografis, dan nilai sejahtera dari suatu daerah, dimana dengan memahami nilai religius yang dapat membuat peta politik suatu daerah dan jenis suku yang ada, dan nilai nistoris dan geografis juga dapat dilakukan kondisi keinginan masyarakat dengan melihat sejarah dan kondisi alam yang ada serta nilai sejahtera yang ada pada masyarakat terlihat pada kondisi suatu daerah yang akan dilakukan pendekatan politik (political approach).

Untuk kajian ekonomi akan terlihat pada pemahaman nilai mandiri dan nilai sejahtera suatu daerah, hal ini terlihat jelas pada nilai mandiri yang dapat ditunjukkan dari etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat agar dapat dilakukan penyampaian program yang diinginkan masyarakat dan nilai sejahtera menunjukkan bagaimana seorang figur pemimpin nantinya melakukan pendekatan pada masyarakat dari sisi ekonomi dengan menyampaikan program yang diinginkan oleh masyarakat.

## **PENUTUP**

Maka kajian pemahaman yang dilakukan terhadap sosio-kultural, politik dan ekonomi tentunya akan memudahkan bagi seorang calon pemimpin yang akan bersaing dalam PILKADA. Tentunya dalam melakukan hal-hal yang dapat dilaksanakan dalam menerapkan strategi tersebut memerlukan suatu konsep *action plan* yang

didasari pada UU. No. 32 Tahun 2004 dalam proses PILKADA. Tulisan ini merupakan suatu wacana yang dapat dijadikan suatu konsep pemahaman kondisi, keinginan, dan kebutuhan masyarakat suatu daerah dalam menentukan pemimpin yang diharapkan dapat mengembangkan suatu wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Geertz, Clifford. 1981. *"Ikatan-ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan di Negara-Negara Baru"*, dalam Juwono Sudarsono (ed.), *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. Jakarta: Gramedia, hal. 1-14.
- Glaser, Nathan dan Daniel P. Moynihan (eds.). 1981. *Ethnicity. Theory and Experience*. Cambridge: Havard University Press
- Koentjaraningrat. 1993. *Masyarakat Terasing di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1984. *Manusia Jan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- N. Sonthanie, 2005, *Dimensi-dimensi Pilkada dan Prospeknya Harian Pikiran Rakyat*, Jakarta Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.
- Sumijati AS Dkk, Editor, *Integrasi, Moral Bangsa dan Perubahan*, Unit Pengkajian Dan Pengembangan Fbud UGM, Sineergi Press, 2002.
- Suwardi Ms, Prof, 1991, *Budaya Melayu dalam Perjalannya Menuju Masa Depan*, Puslit UNRI, Pekanbaru.
- , 2001, *Adat dan Tradisi Masyarakat Melayu: Jati Diri Menuju Masyarakat Madani (Masa Lampau, Kini, Dan Masa Depan)*, Laporan Penelitian Lemlit Unri, Pekanbaru.
- ....., 2005, *Kebudayaan Melayu sebagai Faktor Integrasi Bangsa*, Makalah Pada Kongres Kebudayaan Di Bukittinggi, 18-23 Oktober 2003
- Saini KM.Prof., 2005 *Pilkada di Mata Tokoh*, Harian Pikiran Rakyat, Jakarta.